



## **REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN 2016-2021**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(DINAS PPKB dan P3A) KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T, serta atas rahmat dan karunia-Nya maka Review Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri) Tahun 2016-2021 dapat tersusun dengan lancar.

Review Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, termasuk dengan masa transisi untuk mengatasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah atau masa akhir jabatan Kepala Daerah 2016-2020, maka program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2021.

Review Renstra ini dilakukan karena adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, yang selanjutnya merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri sehingga diharapkan program dan kegiatan yang disusun memuat upaya strategis dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

Kami mengharapkan Review Renstra ini dapat digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas PPKB dan P3A Tahun 2016-2021 yang bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Review Renstra-PD ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Review Renstra-PD ini diucapkan terima kasih. Semoga upaya Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri bersama masyarakat Wonogiri dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera mendapat ridho Allah S.W.T. Amiin.

Wonogiri, 17 Juli 2017  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA dan  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI

RENI RATNASARI, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631220 199010 2 002

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan...	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD</b>	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2 Sumber Daya PD.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	22
2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD.....	42
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	47
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi .....	58
3.2 Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	68
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Provinsi .....	73

3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	77
3.5	Penentu Isu-Isu Strategis .....	80
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1	Visi Dan Misi PD .....	83
4.2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	86
4.3	Strategi Dan Kebijakan .....	89
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	91
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	92
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	96

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Pembangunan manusia Indonesia merupakan titik sentral dalam seluruh pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan selama ini, karena manusia adalah sebagai obyek maupun subyek pembangunan Nasional. Kualitas manusia merupakan tolok ukur dalam pembangunan Nasional hal ini sejalan dengan NAWA CITA yang ke Lima yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri telah memberikan tugas pokok dan fungsi dalam ikut serta meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Kabupaten Wonogiri melalui Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas bahwa Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD yang memuat Visi, Misi,Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsinya, berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif.

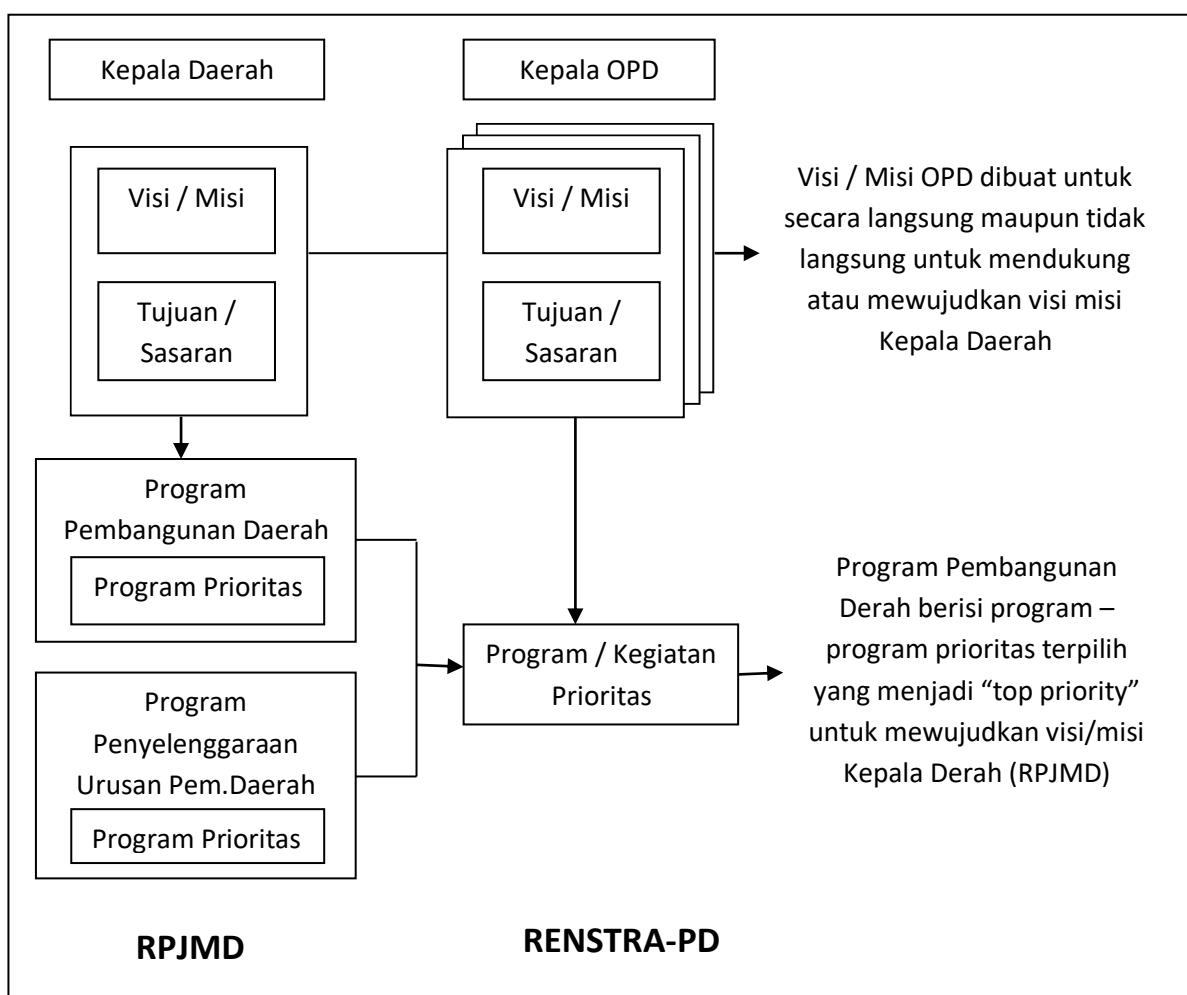
Dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2017 yang mana Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi “ Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, adalah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya dapat disingkat dengan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

Untuk dapat memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PPKB dan P3A yang selanjutnya dapat mendukung Visi Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2016-2021 perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

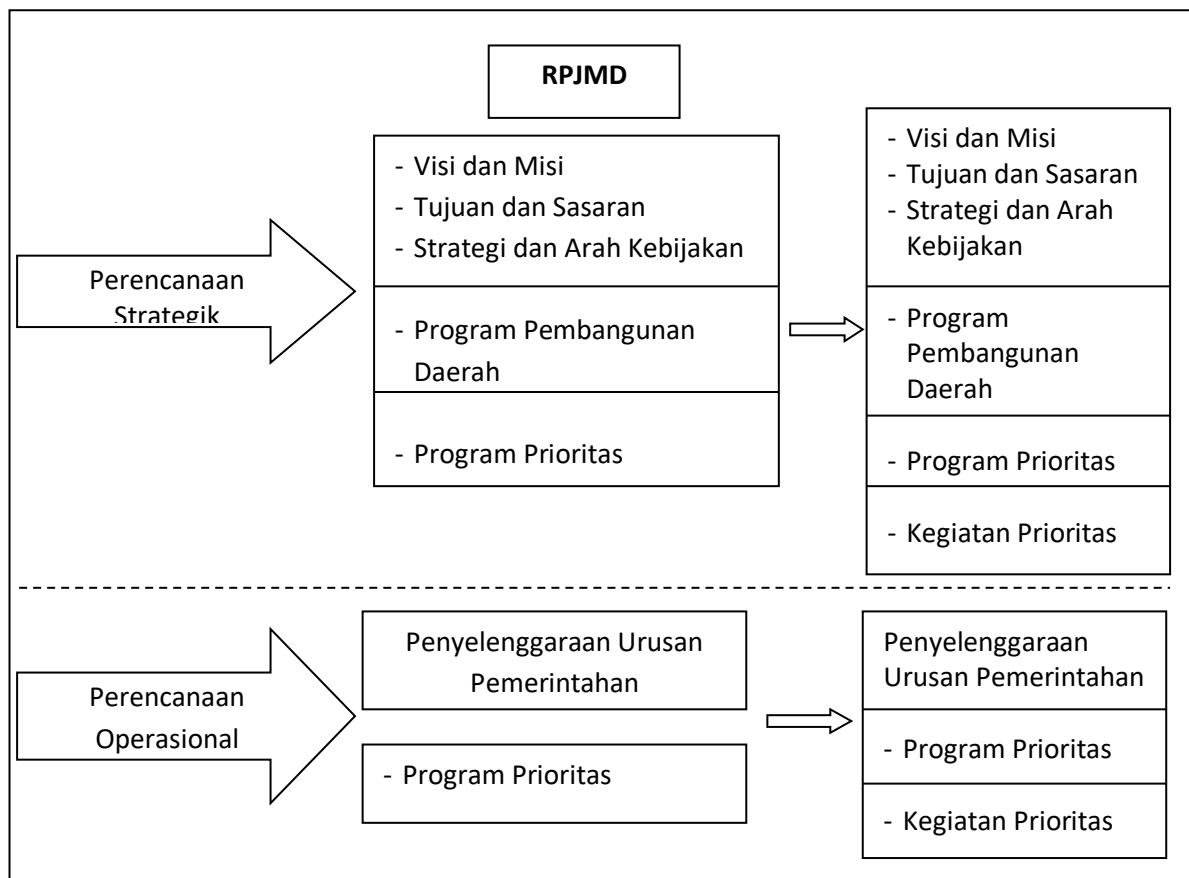
Dengan berpedoman Visi Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tersebut maka Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 perlu memuat Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Target Kinerja untuk lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Dinas PPKB dan P3A ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas PPKB dan P3A, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Bupati dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala OPD dijabarkan dalam Renstra-PD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.1. dan Gambar 1.2. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra -PD.



Gambar 1.1. : Hubungan antara RPJMD dengan Renstra-PD



Gambar 1.2. : Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra-PD

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas PPKB dan P3A ini peraturan yang digunakan sebagai rujukan sebagai berikut:

- a. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- q. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118);

Sedangkan landasan hukum yang menjadi acuan teknis penyusunan Renstra - PD adalah semua Undang-undang dan aturan turunannya terkait Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
15. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Renstra Dinas PPKB dan P3A Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kondisi dan permasalahan terkini yang dihadapi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Wonogiri 2016-2021 “MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS”.

Penyusunan Renstra Dinas PPKB dan P3A ini dilaksanakan sebagai pedoman resmi bagi Dinas PPKB dan P3A dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategi guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB dan P3A, sesuai dengan RPJMD (Renstra Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2016-2021 dan merupakan acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

### **1.3.2.Tujuan**

Adapun tujuan Renstra PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- a. Menyusun Visi Misi Dinas PPKB dan P3A.
- b. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas PPKB dan P3A.
- c. Menetapkan berbagai program prioritas, memberikan arah/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan Dinas PPKB dan P3A.
- d. Memberikan arahan mengenai Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian Renstra Dinas PPKB dan P3A sebagai acuan resmi dalam menentukan prioritas Program dan kegiatan tahunan maupun pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- e. Merupakan langkah percepatan untuk mencapai sasaran dan penyelesaian isu-isu strategis bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Wonogiri periode 2016-2021.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, Pada bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, juga berisi tentang latar belakang dilaksanakannya penyusunan Renstra, keterkaitan antara Renstra dengan RPJMD, Renstra Dinas PPKB dan P3A maupun Renstra Kementerian / Lembaga serta landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN -PD, yang berisi kajian tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas PPKB dan P3A, Sumber daya yang meliputi ketenagaan dan sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi PD serta

capaian hasil kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam kurun lima tahun terakhir serta mengulas hambatan hambatan yang dihadapi.

BAB III : ISU- ISU STRATEGIS, berisi tentang Identifikasi permasalahan yang dihadapi PD berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, penentuan isu isu strategis dan dalam rangka pemahaman arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah, permasalahan permasalahan Dinas PPKB dan P3A berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorongnya.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, yang berisi tentang Visi dan Misi Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam kurun 5 tahun kedepan, Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah serta Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF berisi tentang Program yang merupakan program Prioritas RPJMD sesuai dengan tupoksi Dinas PPKB dan P3A, dengan kegiatan yang sesuai dengan startegi dan kebijakan yang telah ditetapkan

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PPKB dan P3A yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, indikator kinerja kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan sebagai komitmen dukungan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016- 2021

Bab VII : PENUTUP, merupakan uraian penutup yang berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PD**

#### **2.1.Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1.Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) merupakan salah satu instansi Pemerintah yang mempunyai fungsi, Yaitu sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A), Dinas PPKB dan P3A mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Selanjutnya fungsi dan tugas Dinas PPKB dan P3A pada organisasi terendah sebagai berikut :

##### **a. Sekretariat**

Tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

Fungsi : (a) pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas;  
(b) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas; (c) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organsasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; (d) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-unganan di lingkungan Dinas; (e) pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; (f) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas; dan (g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun **Sekretariat** , terdiri dari 2 sub bagian, yaitu :

**a.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan bahan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas.

**a.2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian**, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.

**b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi: (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan (e) pelaksanaan tugas

kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , membawahi 2 seksi**, yaitu :

**b.1. Seksi Pengendalian Penduduk** mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pengendalian penduduk yang meliputi pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.

**b.2. Seksi Keluarga Berencana**, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang keluarga berencana yang meliputi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pelayagunaan tenaga penyuluhan KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

**c. Bidang Keluarga Sejahtera**

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang keluarga sejahtera.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis keluarga sejahtera; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bidang Keluarga Berencana , membawahi 2 seksi**, yaitu :

**c.1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga**, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan

pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pembangunan keluarga yang meliputi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

**c.2 Seksi Pemberdayaan Keluarga**, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah.

**d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

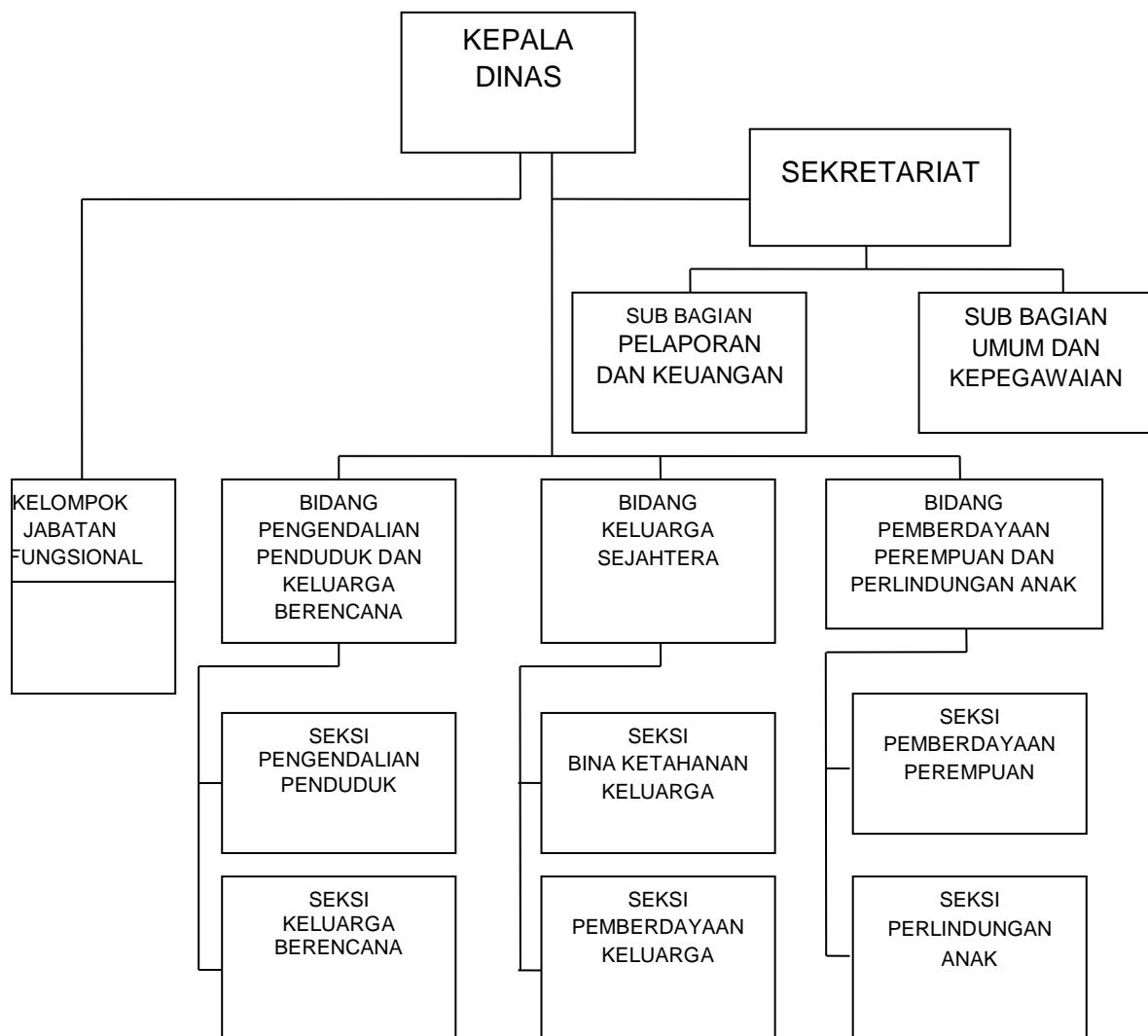
**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , membawahi 2 seksi , yaitu :**

**d.1. Seksi Pemberdayaan Perempuan**, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan; perlindungan perempuan; kualitas keluarga; dan sistem data gender dan anak.

**d.2. Seksi Perlindungan Anak**, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang perlindungan anak melalui Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak.

## 2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dengan 2 Sub Bagian, 3 bidang dengan 6 seksi. Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A

## 2.2. Sumber Daya PD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sampai dengan Tahun 2017 memiliki jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 66 orang terdiri dari PNS Laki-laki 36 orang dan PNS Perempuan 30 orang dengan jabatan yaitu Eselon II B sebanyak 1 orang, Eselon III A sebanyak 1 orang, Eselon III B sebanyak 3 orang, Eselon III C sebanyak 0 Orang, Eselon III D sebanyak 0 orang, Eselon IV A sebanyak 8 orang, Eselon IV B sebanyak 0 orang, Eselon IV C sebanyak 0 orang, serta staf sebanyak 52 orang. Dari 52 orang staf, terdiri dari Penyuluhan KB sebanyak 40 orang, sebanyak 14 orang menjadi Fungsional Umum dan Pegawai Non PNS (kontrak) sebanyak 72 orang.

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan untuk pasca sarjana (S2) sebanyak 9 orang, Sarjana (S1) sebanyak 29 orang, DIII sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 25 orang, SLTP sebanyak 0 orang dan SD sebanyak 1 orang. Secara lengkap dapat dilihat per golongan/ruang per pendidikan terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1  
PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
S-2	2	7	9
S-1	15	14	29
D III	0	2	2
SLTA	18	7	25
SLTP	0	0	0
SD	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>66</b>

*Sumber: Sub Bag Umum dan kepegawaian Dinas PPKB dan P3A, 2017*

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS dan Kontrak sesuai Golongan Ruang dan**  
**Tingkat Pendidikan Tahun 2017**

NO	GOLONGAN / RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN												Jumlah	
		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		SD			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
1.	IV / e	-		-		-		-		-		-		-	
2.	IV / d	-		-		-		-		-		-		-	
3.	IV / c	-	1	-		-		-		-		-		1	
4.	IV / b	1	3	3		-		-		-		-		7	
5.	IV / a	1	3	6	4	-		-		-		-		14	
	<b>Jumlah Gol IV</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>22</b>	
6.	III / d	-	0	2	4	0	1	5	6	-		-		18	
7.	III / c	-		2	4	0	1	5	0	-		-		12	
8.	III / b	-		2	2	-		5		-		-		9	
9.	III / a	-		-		-		-		-		-		-	
	<b>Jumlah Gol III</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>39</b>	
10.	II / d	-		-		-		-	1	-		-		1	
11.	II / c	-		-		-		-		-		-			
12.	II / b	-		-		-		3		-		-		3	
13.	II / a	-		-		-		-		-		1		1	
	<b>Jumlah Gol II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1</b>		<b>5</b>	
14.	I / d	-		-		-		-		-		-		-	
15.	I / c	-		-		-		-		-		-		-	
16.	I / b	-		-		-		-		-		-		-	
17.	I / a	-		-		-		-		-		-		-	
	<b>Jumlah Gol I</b>														
18.	PP 31	-		-		-		-		-		-			
19.	Kontrak	-		12	14	2	11	16	15	0		-		72	
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>0</b>		<b>1</b>		<b>138</b>	

*Sumber: Sub Bag Umum dan kepegawaian Dinas PPKB dan P3A, 2017*

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri apabila dilihat dari tingkat pendidikan merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan Program Nasional Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga serta Program Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 2.2**  
**Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2017**

TAHUN	PEGAWAI	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN										JML		
		L	P	SD		SMP		SMA		DIII		S1		S2		
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2011	KONTRAK	5		0		0		5		0		0		0		5
	PNS KANTOR	16	15	1		0		8		3		13		6		31
	PLKB	38	25	0		0		40		4		11		8		63
<b>JUMLAH</b>		<b>59</b>	<b>40</b>	<b>1</b>		<b>0</b>		<b>53</b>		<b>7</b>		<b>24</b>		<b>14</b>		<b>99</b>
2012	KONTRAK	9		0		0		9		0		0		0		9
	PNS KANTOR	15	13	1		0		9		3		9		6		28
	PLKB	34	23	0		0		27		4		24		2		57
<b>JUMLAH</b>		<b>58</b>	<b>36</b>	<b>1</b>		<b>0</b>		<b>45</b>		<b>7</b>		<b>33</b>		<b>8</b>		<b>94</b>
2013	KONTRAK	10	4	0		2		6		3		3		0		14
	PNS KANTOR	15	11	1		0		8		2		7		8		26
	PLKB	29	19	0		0		22		2		23		1		48
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>34</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>36</b>		<b>7</b>		<b>33</b>		<b>9</b>		<b>88</b>
2014	KONTRAK	21	26	0		2		28		8		9		0		47
	PNS KANTOR	15	11	1		0		8		2		7		8		26
	PLKB	28	19	0		0		21		2		23		1		47
<b>JUMLAH</b>		<b>64</b>	<b>56</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>57</b>		<b>12</b>		<b>39</b>		<b>9</b>		<b>120</b>
2015	KONTRAK	26	33	0		2		34	8	2	9	4		0		59
	PNS KANTOR	15	11	1		0		8		2		3	4	2	6	26
	PLKB	27	19	0		0		14	7	1	1	12	10	1		46
<b>JUMLAH</b>		<b>68</b>	<b>63</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>38</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>131</b>
2016	KONTRAK	25	36	0		3		12	16	2	9	4	15	0		61
	PNS KANTOR	14	10	1		0		8		1		3	3	2	6	24
	PLKB	23	18	0		0		14	3	0	1	12	10	1		41
<b>JUMLAH</b>		<b>62</b>	<b>64</b>	<b>1</b>		<b>3</b>		<b>38</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>126</b>

TAHUN	PEGAWAI	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN										JML		
		L	P	SD		SMP		SMA		DIII		S1				
2017	KONTRAK	31	41	0		2		16	15	2	11	12	14	0	72	
	PNS KANTOR	14	12	1		0		8	1	0	1	3	4	2	6	26
	PLKB	27	18	0		0		10	6	0	1	12	10	0	1	40
<b>JUMLAH</b>		<b>67</b>	<b>71</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>34</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>138</b>

Sumber: Sub Bag Umum dan kepegawaian Dinas PPKB dan P3A, 2017

## 2.2.2 Sarana Prasarana

Jumlah aset yang dimiliki Dinas PPKB dan P3A Tahun 2017, berdasarkan laporan Semester II Aset tahun 2016 BKBKSPP Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya menjadi Aset seluruhnya Dinas PPKB dan P3A yaitu sebanyak 1.922 unit ( Rp 12.556.655.759,-) dengan rincian seperti terlihat dalam tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**

### Daftar Rekapitulasi Inventaris tahun 2015 dan 2016

No	Uraian	Th. 2015		Th. 2016	
		Jml Brg	Jml Harga	Jml Brg	Jml Harga
1	Golongan Tanah	4	290.850.000	6	447.480.001
	01. Tanah	4	290.850.001	6	447.480.000
2	Golongan Peralatan dan Mesin	2668	5.992.178.428	1801	7.340.455.221
	02. Alat-alat Besar	1	28.929.900	2	29.675.000
	03. Alat-alat angkutan	107	2.706.327.100	110	4.344.416.894
	06. Alat-alat kantor dan RT	2148	2.089.165.407	1281	1.643.974.734
	07. Alat-alat studio dan komunikasi	30	57.737.287	28	60.253.082
	08. Alat-alat Kedokteran	382	1.110.018.734	380	1.262.135.511
3	Golongan Gedung dan Bangunan	29	4.538.184.652	31	4.691.449.488
	11. Bangunan Gedung	28	4.530.846.652	29	4.546.982.352
	12. Monumen/ Pagar/ Gapura	1	7.338.000	3	151.805136
4	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2	72.764.050	2	72.764.050
	15. Instalasi				
	16. Jaringan				
5	Golongan Asset Tetap Lainnya	80	4.247.000	82	4.507.000
	17. Buku Perpustakaan	80	4.247.000	82	4.507.000
6	Golongan Konstruksi dalam Penggerjaan				
	20. Konstruksi dalam Penggerjaan	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>2783</b>	<b>10.898.224.130</b>	<b>1922</b>	<b>12.556.655.759</b>

Sumber: Sub Bag Umum dan kepegawaian Dinas PPKB dan P3A, 2017

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Asset Dinas PPKB dan P3A Tahun 2017**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi (%)		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah perkantoran seluas 600 m2	1 bidang	1		
2	Tanah Gudang seluas 495 m2	1 bidang	1		
3	Tanah digunakan untuk gedung P2TP2A dan PPKS seluas 300 m2.	1 bidang	1		
4	Tanah digunakan untuk Balai Penyuluhan KB Kecamatan Wonogiri seluas 964 m2	1 bidang	1		
5	gedung kantor bertingkat luas 404,50 m2, gedung gudang Alokon 42 m2, gudang 50 m2 dan gedung serbaguna "Eling Sedulur" seluas 171,15 m2, Gedung Balai Penyuluhan KB di 25 Kecamatan masing-masing 50 m2	29 bh	28	1	
6	Kendaraan roda empat sebanyak	9 unit	7	2	
7	Kendaraan roda dua sebanyak	98 unit	83	1	14
8	Komputer sebanyak	9 unit	8		1
9	printer sebanyak 48 buah di kantor dan 25 buah di Kecamatan	73 bh	48	13	12
10	Laptop sebanyak	73 unit	71		2
11	Mesin ketik sebanyak	4 buah	4		
12	PPA/ Wirelles sebanyak	42 buah.	41		1
13	LCD 4 buah dan layar sebanyak	6 unit.	6		
14	Telepon parallel	1 unit	1		
15	Telepon	2 unit	2		
16	Faximille	1 unit	2		
17	Camera	7 bh	5	2	
18	Genzet	1 bh	1		
19	BKB KIT	10 bh	10		

20	Genre KIT	4 bh	4		
21	Saund System	2 unit	2		
22	CCTV	1 unit	1		
23	Wifi	1 unit	1		
24	TV	3 bh	3		
25	Meja Kerja	35.buah	35		
26	Kursi Kerja	48 buah	48		
27	Meja Rapat	31 buah	31		
28	Kursi Rapat	735 buah	735		
29	Meja kursi tamu	2 set	2		
30	White board	13 buah	13		
31	AC	22 buah	22		
32	Kipas Angin	50 buah	50		
33	Kulkas	1 buah	1		
34	Kompor gas	3 buah	2	1	

*Sumber: Sub Bag Umum dan kepegawaian Dinas PPKB dan P3A, 2017*

### 2.3 Kinerja Pelayanan PD

Sasaran Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari Sasaran Pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPN, RPJP, Target MDGs/SDGs, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD) yaitu pada prinsipnya adalah **“MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS”**.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Badan

Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKBKSPP). Selama 5 (lima) tahun terakhir Pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat oleh BKBKSPP Kabupaten Wonogiri, merupakan pijakan awal dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang akan diberikan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun yang lalu dapat dilihat kinerjanya dari beberapa pencapaian selama ini sebagai berikut :

#### **Hasil Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:**

Keberhasilan Program Kependudukan dan KB Nasional telah diakui baik tingkat Nasional maupun Internasional. Bahkan Kabupaten Wonogiri telah ditetapkan sebagai salah satu *“Center of Excellence”* di bidang Kependudukan dan KB. Pengalaman masa lalu dengan memperhitungkan kekuatan dan memperbaiki kekurangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan masa depan. Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan dan KB Nasional di masa mendatang Dinas PPKB dan P3A mempunyai kekuatan sebagai berikut :

1. Petugas Lapangan KB (PLKB) yang bertugas di Tingkat Kecamatan dengan wilayah kerja di Desa/Kel dan telah dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan tentang Program KB, seperti Pelatihan Dasar Umum Program KB, Pelatihan Lanjutan Program KB, Pelatihan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pelatihan Konseling Inter Personal (KIP) dan Pelatihan-pelatihan Pendukung lainnya.
2. Telah dimilikinya Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebanyak 294 orang atau setiap Desa/Kelurahan terdapat satu orang petugas PPKBD.
3. Sub PPKBD disetiap Dusun/RW se Kabupaten Wonogiri dengan jumlah 2.371 untuk membantu kegiatan perkembangan Kependudukan dan KB.
4. Jaringan Pelayanan KB yang sudah merata di setiap tingkatan wilayah, dimana ditingkat Kabupaten terdapat 1 (satu) Pusat Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Milik Pemerintah Kabupaten, 6 (enam) Klinik KB Swasta (Marga

Husada, Air Mancur, dr. Sinung Pribadi, PKU Muhammadiyah, Medika Mulya dan Fitri Candra), sebanyak 40 Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) milik Pemerintah.

5. Telah terbentuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera “GIRI KENCANA” di Jalan Nakula VII Wonokarto, Wonogiri, Nomor Telepon (0273) 324076 pada tahun 2013 yang bertujuan memberikan Pelayanan Informasi Kependudukan dan KB, Pelayanan Informasi Remaja, Pelayanan Informasi Pranikah, BKB, BKR, BKL dan memberikan pembinaan UPPKS dan Konseling Khusus Keluarga.
6. Telah Tersusun Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Wonogiri sebagai bentuk komitmen antara Penentu Kebijakan dengan Pelaksana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Wonogiri
7. Telah tersusunnya Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2035 pada Tahun 2013.
8. Telah tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2014.
9. Telah tersusunnya Analisa Dampak Kependudukan Kabupaten Wonogiri setiap tahun.
10. Telah terbentuknya Kampung KB di Desa Tanggulangin Kec. Jatisrono, Desa Kepuhsari Kec. Manyaran, Desa Bulusulur, Kec. Wonogiri, Kel. Bulukerto, Kec. Bulukerto, Desa Sumberejo, Kec. Batuwarno pada tahun 2016.

Sedangkan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri memiliki kekuatan berupa sarana dan prasarana guna memperlancar pelaksanaan program baik di Tingkat Kabupaten maupun di Tingkat Kecamatan bahkan sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan antara lain sebagai berikut :

1. Telah Terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang sudah aktif menangani dan mendampingi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak dengan fasilitas berupa Gedung, sarana dan prasarana pendukung lainnya serta tenaga Full Timer sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga Sekretariat Tim Pendamping sebanyak 17 orang yang

- mempunyai pengalaman dalam pendampingan korban serta petugas pencatatan dan pelaporan KDRT di 25 Kecamatan
2. Telah dicanangkannya menuju Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Kelurahan/Desa Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Sekolahan Ramah Anak di 25 Kecamatan.
  3. Telah Terbentuk Pokja PUG, Focal Point PUG dan KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) sebagai lembaga untuk peningkatan Pengarusutamaan Gender.
  4. Telah dilaksanakannya kegiatan Implementasi Penganggaran Responsif Gender 18 SKPD dan telah menyusun Anggaran Responsif Gender.
  5. Telah Terbentuk KPA (Komisi Perlindungan Anak), Gugus Tugas KLA dan FASRI (Forum Anak Seluruh Wonogiri) sebagai lembaga untuk meningkatkan perwujudan hak-hak Anak.
  6. Telah dimilikinya Data Pilah Gender sejak tahun 2012 dan terus diperbarui setiap tahunnya yang dapat dipergunakan untuk pengambilan kebijakan pembangunan di Daerah.
  7. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan berbasis Gender dan Anak.
  8. Telah disosialisasikannya dan Advokasi Perlindungan Anak bagi Tim, PLKB serta Anggota Masyarakat.
  9. Telah disosialisasikannya dan Advokasi Pengarusutamaan Gender bagi Tim, PLKB serta Anggota Masyarakat.
  10. Telah dibentuknya Kaukus Perempuan Politik Indonesia di Kabupaten Wonogiri sejak Tahun 2013.
  11. Telah dibentuknya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kabupaten Wonogiri tahun 2016 SK Bupati Wonogiri Nomor 247 tahun 2016 dan telah dikukuhkan oleh Bupati Wonogiri pada tanggal 20 Oktober 2016 serta ditindak lanjuti pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan pada tahun 2016.
  12. Telah dibentuknya Tim Pembina Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dengan SK Bupati Nomor 329 tahun 2016.

### 2.3.1 CAPAIAN KINERJA PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Secara garis besar Hasil Kegiatan Operasional yang dapat dicapai dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru.

##### a. Peserta KB Baru Pria.

Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan yang dikembangkan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri dapat diketahui partisipasi pria menjadi peserta KB baru dapat disampaikan tabel 1 berikut :

**Tabel 2.5**

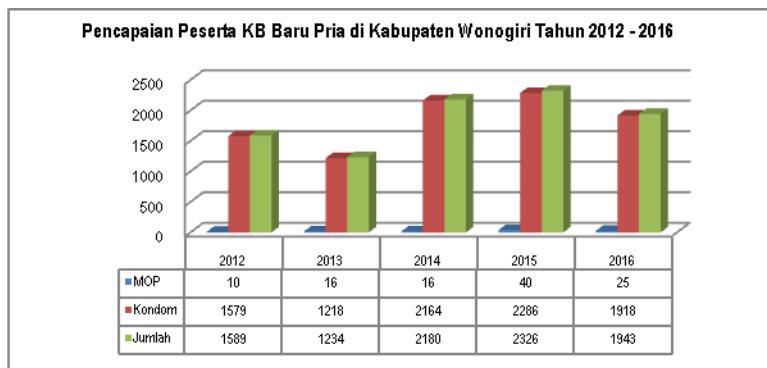
**Partisipasi Pria Menjadi Peserta KB Baru  
Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 – 2016**

No	Tahun	Jumlah PB	MOP	Kondom	Jumlah	%
1	2012	24.073	10	1.579	1.589	6.60
2	2013	21.449	16	1.218	1.234	5.75
3	2014	23.626	8	2.164	2.172	9.19
4	2015	22.318	40	2.286	2.326	10.42
5	2016	19.739	25	1.918	1.943	9.84

*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kesertaan pria dalam ber-KB mengalami penidari tahun ke tahun di mana pada tahun 2012 peserta KB baru Pria (Kondom dan MOP) sebesar 1.589 akseptor (6,60%), sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 1.943 akseptor (9.84%). Ini berarti kesadaran pria dalam KB mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 2.326 akseptor (10,42 %). Kesadaran ber KB pada pria mengalami penurunan pada tahun 2016 yang sebesar 0.58%.

Grafik (1): Pencapaian Peserta KB Baru Pria di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2012 – 2016



Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri

**b. Peserta KB Baru Kumulatif.**

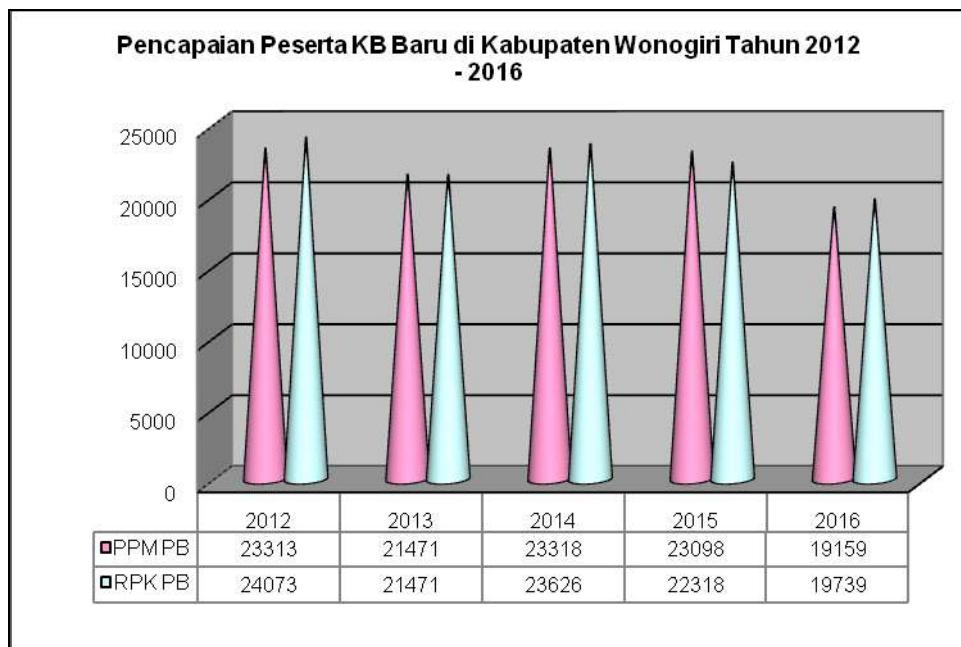
Secara kumulatif hasil pelayanan peserta KB baru di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat disampaikan sebagai tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Peserta KB Baru Tahun 2012 – 2016**  
**Kabupaten Wonogiri**

Tahun	PPM PB	IUD	MOP	MOW	IMP	Suntik	Pil	Kdm	Jml	%
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
2012	23.313	3.764	10	400	2.045	12.452	3.823	1.579	24.073	103.26
		15.64	0,04	1,66	8,49	51,73	15,88	6,56	100	
2013	21.471	2.571	53	222	1.886	9.981	5.335	1.423	21.471	99.90
		11.97	0,25	1,03	8,78	46,49	24,85	6,63	100	
2014	23.318	1.609	475	8	2.822	12.396	4.152	2.164	23.626	101.32
		6,81	2,01	0,03	11,94	52,47	17,57	9,16	100	
2015	23.098	1.351	40	328	2.428	11.717	4.168	2.286	22.318	96,62
		6,05	0,18	1,47	10,88	52,50	18,68	10,24	100	
2016	19.159	1.163	25	348	2.963	10.136	3.186	1.918	19.739	103.03
		6,07	0,13	1,81	15,46	52,90	16,62	10,01	100	

Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri

Grafik Grafik (2):  
Pencapaian Peserta KB Baru di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2012 – 2016



Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri

## 2. Hasil Pembinaan Peserta KB Aktif

### a. Partisipasi Pria Menjadi Peserta KB Aktif

Secara kumulatif perkembangan jumlah peserta KB aktif pria di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2012 s/d 2016 mengalami penurunan, yaitu dari sejumlah 4.270 akseptor (2,29%) pada tahun 2012 menjadi 4.218 akseptor (2.9%) dari total peserta KB aktif yang ada pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan peserta KB aktif pada tahun 2015 mengalami Kenaikan dari 3.584 akseptor (2.47%) dari total peserta KB aktif. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati tabel berikut :

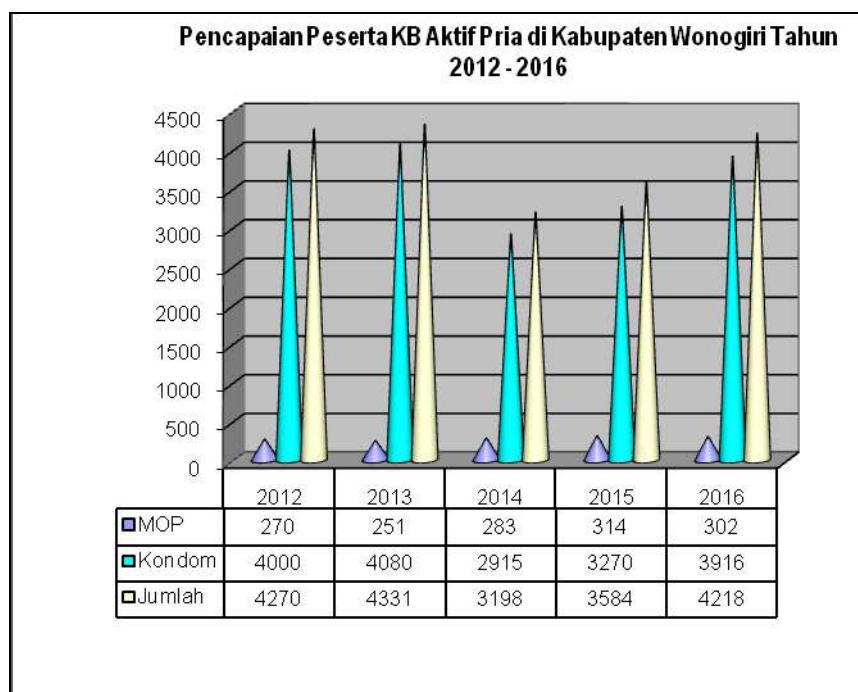
**Tabel 2.7**  
**Partisipasi Pria Menjadi Peserta KB Aktif**  
**Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2015**

No	Tahun	Jumlah		Kondom	Jumlah	%
		PA	MOP			
1	2012	186.662	270	4.000	4.270	2.29
2	2013	184.466	251	4.080	4.331	2.35
3	2014	158.060	283	2.915	3.198	2.02
4	2015	144.895	314	3.270	3.584	2.47
5	2016	145.343	302	3.916	4.218	2.90

*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

**Grafik (3)**

Pencapaian Peserta KB Aktif Pria di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2012 – 2016.



*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

### b. Peserta KB Aktif

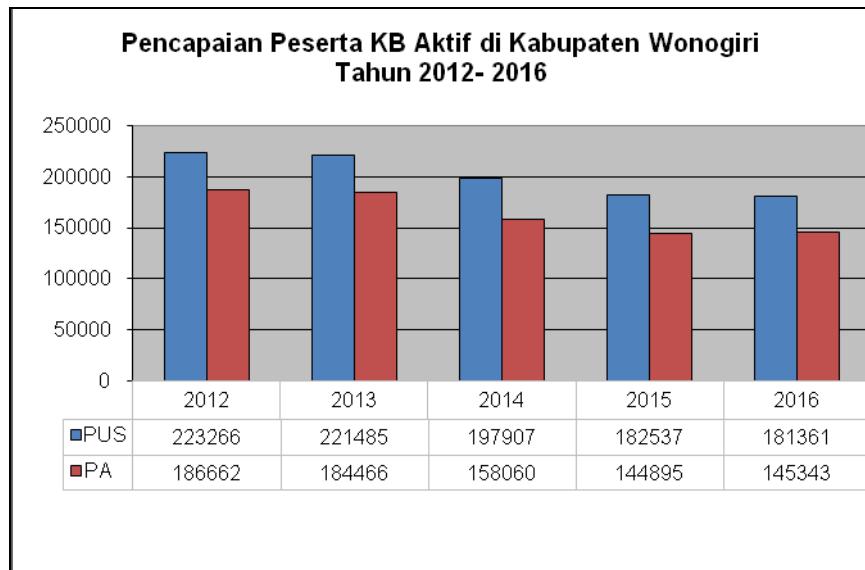
Perkembangan hasil pembinaan peserta KB aktif (kumulatif) di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat disampaikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Peserta KB Aktif Tahun 2012 – 2016**  
**Kabupaten Wonogiri**

No.	TAHUN	PUS	PA	%
1	2012	223.266	186.662	83.61
2	2013	221.485	184.466	83.29
3	2014	197.907	158.060	79.87
4	2015	182.537	144.895	79,38
5	2016	181.361	145.343	80.14

*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

Grafik (4) Pencapaian Peserta KB Aktif di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2012 – 2016



*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

### 3. Hasil Pembinaan Peserta KB Aktif Mandiri

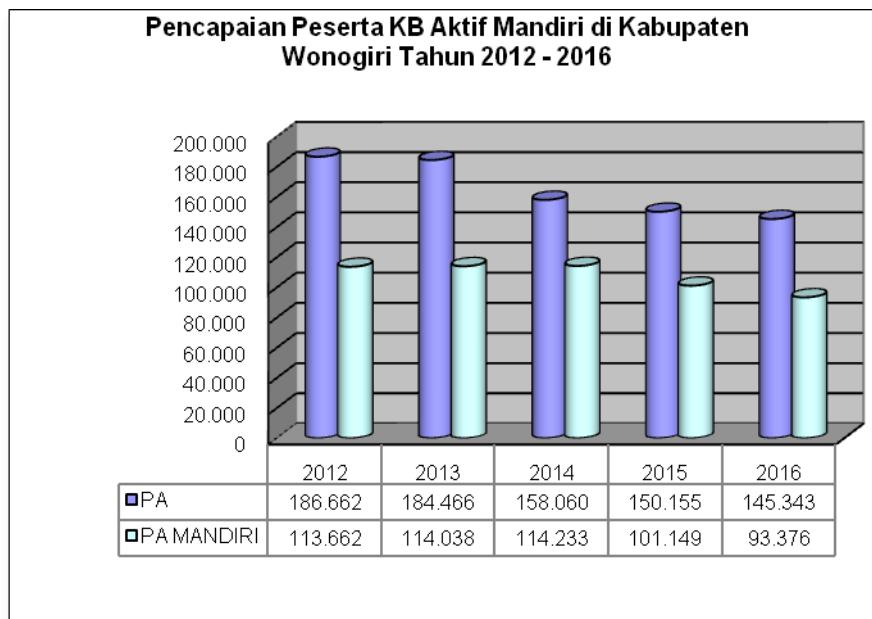
Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri dapat diketahui partisipasi masyarakat menjadi peserta KB Mandiri aktif dapat dicermati tabel 5 berikut:

**Tabel 2.9**  
**Partisipasi Masyarakat Menjadi Peserta KB Mandiri Aktif**  
**Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 – 2016**

No	Tahun	Jumlah PA	PA Mandiri	%
1	2012	186.662	113.662	60.89
2	2013	184.466	114.038	61.82
3	2014	158.060	106.233	67.21
4	2015	144.895	98.415	67.92
5	2016	145.343	98.376	67.69

*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

**Grafik (5) Pencapaian Peserta KB Aktif Mandiri di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2012 – 2016**



*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

#### 4. Droup Out

Berdasarkan perhitungan kasar diperoleh Data Droup Out (DO) dari tahun 2012 sampai dengan 2016

**Tabel 2.10**  
**Droup Out Kabupaten Wonogiri**  
**Tahun 2012 – 2016**

Tahun	PA Awal	PB	PA Seharusnya	PA Sekarang	DO	%
2012	183.059	4.073	207,132	186,662	20,470	11.18
2013	186.671	1.449	208,120	184,466	23,654	12.67
2014	184.466	23.626	208.092	158.060	50.032	27.12
2015	158.060	22.269	180.329	144.895	35.434	22,42
2016	144.895	19.739	164.634	145.343	19.291	13.31

*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

#### 5. Unmetneed

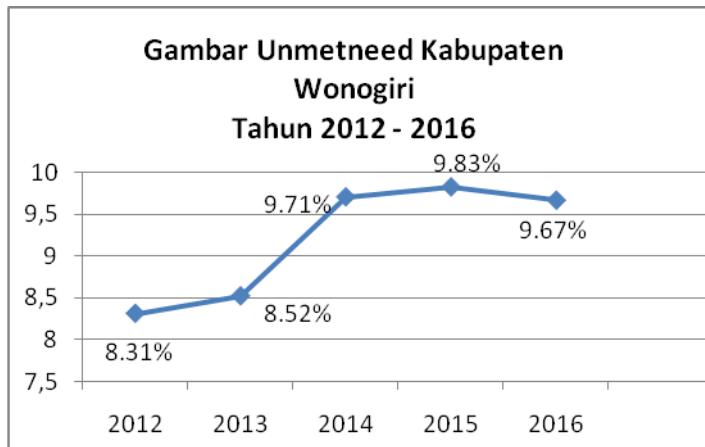
Unmetneed Tahun 2012 mengalami penurunan dari sebesar 18.551 (8,31%) pada tahun 2016 sebesar 17.539 (9.67%). Jika dibandingkan dengan Unmetneed Tahun 2015 sebesar 17.944 (9,83%) maka terjadi penurunan.

**Tabel 2.11**  
**Unmetneed Kabupaten Wonogiri Wonogiri**  
**Tahun 2012 – 2016**

No.	TAHUN	PUS	Unmetneed	%
1	2012	223.266	18.551	8.31
2	2013	221.485	18.869	8.52
3	2014	197.907	19.210	9.71
4	2015	182.537	17.944	9,83
5	2016	181.361	17.539	9.67

*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

Grafik (6) Unmetneed Kabupaten Wonogiri  
Tahun 2012 – 2016



Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri

## 6. Hasil Efek Dampak Program KB terhadap Aspek Demografi

Keberhasilan Program KB di suatu wilayah diukur dari kondisi CWR, TFR dan Laju Pertumbuhan Penduduk.

**Tabel 2.12**  
**Hasil Efek Dampak Terhadap Aspek Demografi**  
**Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 – 2016**

NO	TAHUN	CBR	TFR	CWR	GRR	LPP
1	2012	-	-	-	-	-
2	2013	12.17	1.7	225.5	800.27	0.192
3	2014	11.36	1.59	224.4	796.28	- 3.12
4	2015	3.54	0.5	178.8	634.04	-1.56
5	2016	3.54	0.5	98.52	349.56	0.007

Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri

## 7. Hasil Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Ada 3 (tiga) indikator utama yang dapat disampaikan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pembinaan terhadap Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP),

yaitu Petugas PPKBD/SKD, Kader Sub PPKBD (PKB-RW) dan Kader PKB-RT. Sebagaimana kita ketahui bahwa peranan para institusi ini terhadap keberhasilan program KB cukup besar, para institusi merupakan “**UJUNG TOMBAK**” bagi pelaksanaan program KB di lini lapangan.

Perkembangan keberadaan institusi tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Perkembangan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**  
**Di Kabupaten Wonogiri**

KLASIFIKASI	PPKBD		SUB PPKBD		PKB RT	
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
Dasar	51	17.34	607	25.54	1920	27.47
Berkembang	157	53.4	1163	48.93	3638	52.05
Mandiri	96	32.65	607	25.54	1432	20.49
<b>Total</b>	<b>294</b>	<b>100</b>	<b>2377</b>	<b>100</b>	<b>6990</b>	<b>100</b>

*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

Dari tabel diatas dapat diketahui perkembangan IMP di Kabupaten Wonogiri sudah cukup mantap. Secara kualitas masih pada klasifikasi “Berkembang”.

#### **Hasil Pembinaan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

##### **a. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)**

Jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) sampai akhir tahun 2016 sebanyak 953 kelompok, dengan klasifikasi:

- Dasar : 302 Kelompok
- Berkembang : 423 Kelompok
- Paripurna : 228 Kelompok

##### **b. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)**

Jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) sampai akhir tahun 2016 sebanyak 150 kelompok, dengan klasifikasi:

- Awal : 75 Kelompok
- Berkembang : 58 Kelompok
- Paripurna : 17 Kelompok

**c. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)**

Jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) sampai akhir tahun 2016 sebanyak 347 kelompok.

- Awal : 166 Kelompok
- Berkembang : 135 Kelompok
- Paripurna : 46 Kelompok

**d. Kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)**

Jumlah kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sampai akhir tahun 2016 sebanyak 710 kelompok, dengan klasifikasi:

- Dasar : 258 Kelompok
- Berkembang : 354 Kelompok
- Paripurna : 98 Kelompok

**e. Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)**

Pos Pemberdayaan Keluarga telah dilaunching pada tanggal 7 Mei 2013 oleh Bupati Wonogiri H. DANAR RAHMANTO dengan dihadiri Prof. HARYONO SUYONO beserta Tim dari Yayasan Damandiri.

Jumlah Posdaya yang tersebar di 25 Kecamatan Tahun 2013 sebanyak 583 Kelompok yang telah dilaunching pada tanggal 16 s/d 23 Desember 2013 di 25 Kecamatan, sampai dengan tahun 2016 telah terbentuk posdaya sebanyak 596.

**f. Kampung KB**

Pada tahun 2016 telah dicanangkannya kampung KB di Desa Tanggulangin, Kec. Jatisrono oleh Ibu Puan Maharani Menko PMK RI dan dilanjutkan dengan launching Kampung KB di 4 Kecamatan oleh Bupati Wonogiri JOKO SUTOPO,

antara lain Desa Kepuhsari Kec. Manyaran, Desa Bulusulur Kec. Wonogiri, Kelurahan Bulukerto Kec. Bulukerto dan Desa Sumberejo Kec. Batuwarno.

## **8. Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).**

Respon dari masyarakat maupun tokoh masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) cukup baik hal ini diwujudkan dalam upaya pembentukan PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja) ditingkat kecamatan.

Sampai akhir tahun 2016 di Kabupaten Wonogiri sudah terbentuk PIK-KRR sebanyak 70 (tujuh puluh) kelompok yang terdiri dari jalur masyarakat 32 kelompok, jalur pendidikan 38 kelompok, dengan klasifikasi :

No	Klasifikasi PIK	Jalur Masyarakat	Jalur Pendidikan
1	• Tumbuh	16	34
2	• Tegak	9	0
3	• Tegar	7	4
	Jumlah	<b>32</b>	<b>38</b>

## **12. Pembentukan Kelompok KB Pria**

Sampai dengan akhir tahun 2016 di Kabupaten Wonogiri terbentuk 25 kelompok KB pria, setiap kecamatan terdapat satu kelompok KB Pria.

## **13. Dampak Program Keluarga Berencana**

### **1. Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan.**

Pendewasaan Usia Perkawinan, dari data yang ada (hasil pendataan keluarga) dapat diketahui umur PUS yang kurang dari 20 tahun adalah sebagai berikut :

- Tahun 2009, sebesar : 2.562 PUS atau 1,18 %
- Tahun 2010, sebesar : 2.624 PUS atau 1,21 %
- Tahun 2011, sebesar : 2.337 PUS atau 1,06 %
- Tahun 2013, sebesar : 2.354 PUS atau 1,08 %

- Tahun 2014, sebesar : 1.991 PUS atau 1,01 %
- Tahun 2015, sebesar : 1.300 PUS atau 0,74 %
- Tahun 2016, sebesar : 1.826 PUS atau 1,06 %

## 2. Indikator Jumlah Jiwa dibanding KK (Hasil Pendataan Keluarga)

Indikator lain untuk mengetahui keberhasilan program KB adalah rendahnya angka jumlah jiwa terhadap kepala keluarga (KK). Data data yang olah oleh Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri dengan mengacu hasil pendataan keluarga, maka jumlah jiwa terhadap kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Wonogiri adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.14**  
**Perkembangan Jumlah Jiwa Terhadap Kepala Keluarga**  
**Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 – 2016**  
**(Hasil Pendataan Keluarga)**

Tahun	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Rasio
2012	1.088.021	327.553	3,32
2013	1.090.115	332.719	3,28
2014	1.058.149	328.187	3,22
2015	1.041.758	330.079	3,16
2016	1.041.827	330.093	3,16

*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio jumlah jiwa dibanding jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan secara signifikan, dimana pada tahun 2012 rasio jumlah jiwa dibanding jumlah kepala keluarga adalah sebesar 3,32 dan pada tahun 2016 jumlah jiwa dibanding jumlah kepala keluarga sebesar 3,16 atau terjadi penurunan sebesar 0,16 point.

### 3. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera

Indikator lain untuk mengetahui keberhasilan program KB adalah tinggi atau rendahnya derajat kesejahteraan keluarga. Dari hasil Pendataan Keluarga yang dikembangkan di Kabupaten Wonogiri dapat disampaikan sebagaimana table berikut:

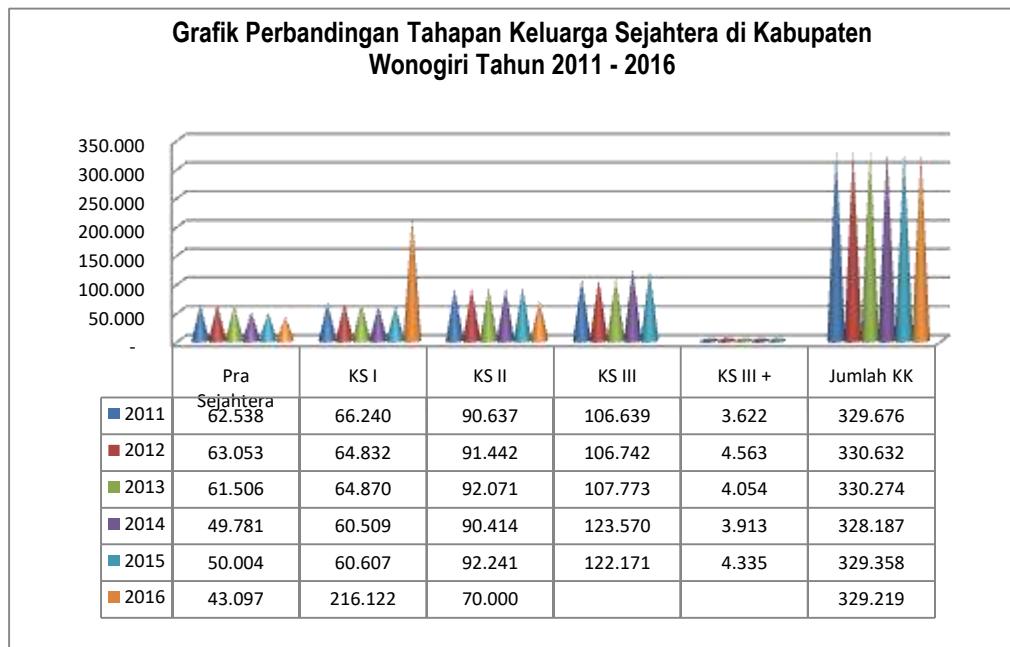
**Tabel 2.15**  
**Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera**  
**Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2016**

Tahun	Pra Sejahtera	KS I	KS II	KS III	KS III +	Jumlah KK
2011	62.538	66.240	90.637	106.639	3.622	329.676
2012	63.053	64.832	91.442	106.742	4.563	330.632
2013	61.506	64.870	92.071	107.773	4.054	330.274
2014	49.781	60.509	90.414	123.570	3.913	328.187
2015	50.004	60.607	219.211*	-	-	329.822
2016	43.097	216.122	70.000	-	-	330.094

Ket : \*) Pendataan Keluarga Th. 2015 sampai Tahapan Keluarga Sejahtera

Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri

**Grafik (7) Grafik Perbandingan Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2011 dengan Tahun 2016**



*Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri*

### **2.3.2 CAPAIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Penanganan dari Pengaduan Kasus yang diterima di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah selesai ditangani semuanya, dibawah ini kami sajikan rekapitulasi data yang ada di P2TP2A dengan sekretariat beralamat di Jalan Nakula VII Wonokarto, Wonogiri, Telepon (0273) 324076 sebagai berikut :

#### **Data Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2012 s/d 2016.**

##### **Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan terhadap Anak Tahun 2012**

Kategori	Korban		Pelaku		Kekerasan			
	L	P	L	P	Seksual	Penelantaran	KD RT	Fisik
Anak	0	39	0	0	28	10	1	0
Dewasa	0	30	69	0	0	0	28	2
Jumlah	0	69	69	0	28	10	29	2
<b>Total</b>	<b>69</b>		<b>69</b>		<b>69</b>			

**Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan**

Pelayanan		Jumlah	
Kesehatan		34 orang	
Bantuan Hukum		30 orang	
Rehabilitasi Sosial		25 orang	

**Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2013**

Kategori	Korban		Pelaku		Kekerasan		
	L	P	L	P	Fisik	Seksual	Penelantaran
Anak	3	29	44	1	3	25	4
Dewasa	0	14	14	0	6	0	4
Jumlah	3	43	58	1	9	25	8
<b>Total</b>	<b>46</b>		<b>59</b>		<b>42</b>		

**Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan**

Kategori	Pelayanan				
	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial
Anak	29	0	0	29	15
Dewasa	0	0	0	0	0
Jumlah	29	0	0	29	15

**Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2014**

Kategori	Korban		Pelaku		Kekerasan			
	L	P	L	P	Fisik	Seksual	Penelantaran	Psikis
Anak	1	30	0	0	1	29	0	1
Dewasa	0	15	50	0	4	4	0	8
Jumlah	1	45	50	0	5	33	0	9
<b>Total</b>	<b>46</b>		<b>50</b>		<b>47</b>			

**Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan**

Kategori	Pelayanan					
	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Pemulangan Reintegrasi	Rehabilitasi Sosial
Anak	20	3	2	33	0	5
Dewasa	4	0	1	6	0	0
Jumlah	24	3	3	39	0	5

**Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2015**

Kategori	Korban		Pelaku		Kekerasan			
	L	P	L	P	Fisik	Seksual		KDRT
						L	P	
Anak	1	36	3	0	1	1	32	2
Dewasa	0	5	43	0	0	0	0	5
Jumlah	1	41	46	0	1	33		8
<b>Total</b>	<b>42</b>		<b>46</b>		<b>42</b>			

**Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan**

	Pelayanan						
Kategori	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Bimbingan Psikolog	Pemulangan Reintegrasi	Rehabilitasi Sosial	
Anak	37	33	32		0	5	
Dewasa	5	0	0	8	0	0	
Jumlah	42	33	33	8	0	5	

**Rekapitulasi Akhir Data Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2016**

Kategori	Korban		Pelaku		Kekerasan			
	L	P	L	P	Fisik	Seksual		KDRT
						L	P	
Anak	2	34			2	2	36	
Dewasa	1	9				2		5
Jumlah	3	43			2	40		5
<b>Total</b>	<b>46</b>				<b>47</b>			

#### Layanan yang diberikan pada Korban Kekerasan

Kategori	Pelayanan					
	Pengaduan	Kesertan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Pemulangan Reintegrasi	Rehabilitasi Sosial
Anak	40	40	40	20	1	40
Dewasa	10	2	2	2	-	10
Jumlah	50	42	42	22	1	50

Sumber data : BKBKSPP Kab. Wonogiri

#### 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BKBKSPP berdasarkan sasaran/target Renstra -PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan -PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Ada 6 indikator kinerja yang diterapkan dalam RPJMD 2010-2015, yang juga dituangkan dalam Ranstra BKBKSPP tahun 2010 – 2015. Indikator yang ada dalam SPM untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 8 Indikator kinerja dan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ada 9 Indikator kinerja sedangkan untuk Indikator kinerja pada MDGs ada 4 Indikator.

Target dan capaian kinerja pada masing-masing Indikator tersebut sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 2.4**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA RPJMD TAHUN 2011-2015**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	<b>URUSAN PPPA</b>																
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	0,65	0,66	0,67	0,71	0,69	0,48	0,86	0,63	0,48	0,46	73,85	130,30	94,03	67,61	66,67
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44	0,52	0,36	0,37	0,32	0,44	144,44	94,74	92,50	76,19	100,00
	Jumlah KDRT	%	0,000034	0,000033	0,000032	0,000031	0,00003	0,000077	0,00008	0,00004	0,000077	0,00008	(26,47)	(42,42)	75,00	(48,39)	(66,67)
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,052	0,051	0,05	0,049	0,048	0,054	0,024	0,057	0,054	0,056	96,15	152,94	86,00	89,80	83,33
	<b>URUSAN KBKS</b>																
	Rata - Rata Jumlah Anak per Keluarga	Angka	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	0,94	1,02	0,82	0,94	0,89	109,62	100,97	119,61	106,93	111,00
	Rasio Akseptor KB	Angka	82,43	82,44	82,45	82,46	82,47	79,87	83,61	83,28	79,87	79,94	96,89	101,42	101,01	96,86	96,93
	Rasio Keluarga Pra KS dan KS 1	Angka	39,54	39,04	38,54	38,04	37,54	39,06	38,79	37,97	33,61	33,56	101,21	100,64	101,48	111,65	110,60

### **3. Aspek Pelayanan Umum**

Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### **A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan.**

Prosentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan merupakan perbandingan antara jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah pekerja perempuan. Dalam tahun 2011 rasio menunjukkan angka 0,62, yang artinya setiap 100 orang pekerja wanita 62 orang diantarnya bekerja di lembaga pemerintahan. Angka tersebut cenderung menurun, hingga menjadi hanya 0,46 di tahun 2015. Penurunan pertanda positif, karena mungkin semakin banyak perempuan yang masuk lapangan kerja di luar pemerintahan, sementara perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan cenderung tetap.

##### **2. Rasio KDRT.**

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan gambaran tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Wonogiri. Rasio KDRT di tahun 2011 sebesar 0,00004 artinya di setiap 10.000 RT terdapat 4 KDRT. Angka tersebut meningkat di tahun 2012 menjadi 8 di setiap 100.000 RT, dan cenderung tetap sebesar 2 di setiap 100.000 RT di tahun 2014 dan 2015.

##### **3. Prosentase Pekerja Di Bawah Umur.**

Prosentase pekerja di bawah umur merupakan perbandingan antara pekerja anak yang berumur 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja. Sekecil apapun angka menunjukkan bahwa masih terjadi kasus anak-anak yang semestinya menikmati pendidikan harus sudah bekerja. Dalam tahun 2011 angka prosentase pekerja di bawah umur sebesar 0,024, dan pada tahun 2015 sebesar 0,056. Semetinya angka ini harus dihilangkan, sehingga tidak ada anak yang masuk lapangan kerja.

## B. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1. Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga

Jumlah anak per keluarga di Kabupaten Wonogiri cenderung turun, dari sekitar 1,04 di tahun 2010 menjadi 0,89 di tahun 2015. Artinya secara rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 1 anak.

### 2. Rasio Akseptor KB.

Rasio akseptor KB menggambarkan prosentase jumlah pasangan usia subur yang mengikuti Program Keluarga Berencana. Secara rata-rata dalam periode tahun 2011-2015, Rasio Akseptor KB mencapai 81,83%, artinya 81,83% pasangan usia subur di kabupaten Wonogiri mengikuti program KB.

### 3. Keluarga Pra KS dan KS I

Jumlah keluarga Pra KS pada tahun 2011 sebanyak 62.538 KK, turun menjadi 50.004 KK tahun 2016. Untuk keluarga yang masuk katagori Keluarga Sejahtera I pada tahun 2011 sebanyak 66.240, meningkat menjadi 66.607 di tahun 2015. Rata-rata Rasio Keluarga Pra Sejahtera terhadap jumlah KK dalam periode tahun 2010-2015 sebesar 17,1% dan rata-rata rasio Keluarga Sejahtera I terhadap jumlah KK di Kabupaten Wonogiri sebesar 19,5%.

**Tabel 2.21**  
**Pencapaian Indikator Kinerja pada MDGs**  
**Tahun 2013 s/d 2015**

**TUJUAN 3 :**  
**MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

NO.	INDIKATOR	2013		TAHUN 2014		TARGET MDGs 2015	SUMBER DATA
		REALISASI	TARGET	REALISASI			
3.A	Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjut pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015						
3.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	11%	20%	9,75%	Meningkat	BKPKSPP	

**TUJUAN 5**  
**MENINGKATKAN KESEHATAN IBU**

NO.	INDIKATOR	2013		TAHUN 2014		TARGET MDGs 2015	SUMBER DATA
		REALISASI	TARGET	REALISASI			
5.A	Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015						
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Prosentase PUS yang sedang ber KB dibagi jumlah PUS (Pasangan Usia Subur))	83,29%	83%	83,27%	70,6	BKPKSPP	
5.4	Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)				22,92	belum ada data	
5.6	Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB) yang tidak terpenuhi	8,52	8%	8,11%	5	BKPKSPP	

## 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, ada beberapa tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang, sebagai berikut :

**Kelemahan (Weakness)** dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya tenaga PLKB/PKB sebagai pelaksana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB PK) di Tingkat Lini Lapangan, dengan rasio jumlah PLKB/PKB terhadap Jumlah Desa/Kelurahan 1 : 7, artinya 1 PLKB/PKB mempunyai wilayah binaan 6-7 Desa/Kelurahan, sehingga pelaksanaan Program KKB PK didaerah kurang maksimal.
- 2) Belum maksimalnya komitmen pada pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mendukung pelaksanaan program KKB PK dilihat dari kebijakan yang diambil belum menempatkan program KKB PK sebagai Prioritas Pembangunan Daerah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

**Kelebihan/Kekuatan** yang telah dimiliki saat ini dalam mendukung pelaksanaan Program KKB PK mulai dari tingkat lini lapangan sebagai berikut :

- 1) Masih kuatnya jaringan program oleh Institusi Masyarakat Pedesaan dengan adanya PPKBD ditingkat Desa/Kelurahan sebanyak 294 orang dan Sub PPKBD di tingkat Dusun atau RW sebanyak 2.371 orang yang siap membantu PLKB/PKB.

- 2) Telah terbangunnya Gedung Balai Penyuluhan KB di setiap Kecamatan lengkap dengan sarana dan prasarana yang dapat dimaksimalkan penggunaannya sebagai pusat pelayanan Edukasi, Informasi dan Konseling KB, sebagai tempat untuk berkoordinasi dengan masyarakat, mitrakerja, instansi lain dalam pelaksanaan program KKB PK di tingkat Kecamatan.
- 3) Dukungan Alat Kontrasepsi dari Pusat yang mampu memenuhi kebutuhan Permintaan Masyarakat.
- 4) Tenaga medis yang terlatih sebagai pelaksanaan pemasangan alat kontrasepsi telah tersebar di 25 Kecamatan.
- 5) Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dari jalur masyarakat sebanyak 32 kelompok dan dari jalur pendidikan sebanyak 38 kelompok.

Tantangan dan Peluang dalam pelaksanaan Program KKB PK di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

**Tantangan :**

- 1) Banyaknya ketertarikan Remaja Wonogiri yang ingin merantau ke Kota.
- 2) Cepatnya Informasi dari luar dengan adanya kemajuan teknologi yang belum dipergunakan secara bijak oleh masyarakat.
- 3) Tingginya Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terlayani.
- 4) Kurangnya minat Pria untuk ber KB.
- 5) KIE Program Pembangunan Keluarga semakin berat.
- 6) Kader Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang sedikit sehingga satu Kader banyak yang merangkap beberapa Poktan.
- 7) IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yang terdiri dari PPKBD, Sub PPKBD yang berpengetahuan rendah sering mengundurkan diri/keluar.

**Peluang :**

- 1) Dengan adanya pabrik-pabrik yang ada di Wonogiri menyebabkan Remaja di Wonogiri bisa mengurangi Remaja Merantau.
- 2) Belum seluruhnya Sekolah dan Perguruan Tinggi terbentuk PIK Jalur Pendidikan.
- 3) Jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan tenaga medis yang terlatih dalam pemasangan/pencabutan alat kontrasepsi.

- 4) Pemberdayaan PPKBD dan Sub PPKBD untuk melaksanakan Konseling Informasi dan Edukasi kepada masyarakat disekitar tempat tinggalnya tentang Program KKB PK di masing-masing Desa/Kelurahan.
- 5) Mengaktifkan peran Kelompok KB Pria yang telah terbentuk di 25 Kecamatan dalam pelaksanaan KIE KB Pria dilingkungan sekitarnya.
- 6) Adanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di tingkat Kabupaten, harapannya bisa memberikan pencerahan dan KIE tentang program KKBPK.
- 7) Telah dibentuknya dan telah diresmikannya "Kampung KB" mulai tahun 2016.
- 8) Adanya pembinaan terhadap kader BKB, BKR, BKL, UPPKS secara berkala dalam rangka peningkatan pengetahuan Kader.
- 9) Pemberian Honor kepada PPKBD dan Sub PPKBD setiap bulannya untuk mendukung kegiatan IMP.

**Kelemahan** (*Weakness*) dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

- 1) Belum maksimalnya pengelolaan P2TP2A di 25 Kecamatan karena keterbatasan SDM baik kwalitas maupun kuantitasnya.
- 2) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menangani masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Belum adanya tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelanggaran penyalah gunaan tempat-tempat publik untuk praktik asusila.

**Kelebihan/Kekuatan** yang dimiliki dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

- 1) Telah adanya kesepakatan kerjasama dengan Mitra Kerja yang terdiri dari Organisasi Masyarakat dan Organisasi Swasta maupun dengan Dinas/Instansi lain dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Telah ditandatanganinya deklarasi Puskesmas, Sekolah, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Layak/Ramah Anak pada Tahun 2014.
- 3) Terbentuknya Pawon Emak di 25 Kecamatan pada Tahun 2013.
- 4) Adanya pendampingan baik dari psikolog, bantuan hukum dan rehabilitasi terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 5) Telah dibentuknya Kaukus Perempuan Politik Indonesia di Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2013.
- 6) Telah dibentuknya Satgas Perlindungan Anak tingkat Kabupaten Wonogiri.
- 7) Telah dibentuknya Satgas Perlindungan Anak tingkat Kecamatan s/d Desa/Kel pada tahun 2016.
- 8) Telah dibentuknya Tim Pembina Satgas Perlindungan Anak di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016.

Tantangan dan Peluang dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

**Tantangan :**

- 1) Banyaknya orang tua yang memantau menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat.
- 2) Kemajuan teknologi membuat anak mudah mengakses gambar-gambar porno sehingga berpengaruh pada perilaku anak.
- 3) Kurangnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama, sikap perilaku dan budi pekerti kepada anak.
- 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- 5) Kurangnya SDM dalam menangani kasus dan pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di setiap Kecamatan.

**Peluang :**

- 1) Memaksimalkan Forum Anak sebagai ajang peningkatan kualitas hidup anak.
- 2) Keterlibatan Anak dalam perencanaan pembangunan.
- 3) Mengaktifkan peran Mitra Kerja dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4) Terbentuknya P2TP2A Kabupaten dan P2TP2A Kecamatan sehingga Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan segera bisa ditangani.
- 5) Menanamkan nilai-nilai agama dan budi perkerti memalui pendidikan formal maupun non formal di semua jenjang pendidikan.

- 6) Terbentuknya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih mudah terdeteksi dan ditangani lebih cepat.

#### **2.5.4. Kebutuhan Layanan Dinas PPKB dan P3A 5 (lima) Tahun Kedepan.**

Dari uraian diatas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri maka terkait dengan kedua Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tersebut dapat ditentukan kebutuhan layanan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri 5 (lima) tahun kedepan untuk mengatasi tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

##### **A. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**

1. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja
2. Peningkatan pengetahuan manajemen dan pelatihan usaha bagi kelompok UPPKS.
3. Pembuatan Galeri UPPKS dengan fokus lokasi di kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Selogiri dan perkotaan Baturetno.
4. Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi terutama di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah perbatasan.
5. Peningkatan Pembinaan Kelompok Tri Bina.
6. Pengadaan KKA dan APE.

*(tantangan : Tingginya Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB yang tidak terlayani).*

7. Peningkatan Pembinaan Kelompok Prio Utomo.
8. Pemberian bantuan Sosial bagi peserta KB MOP
9. Peningkatan Pelayanan KB Medis Operasi  
*(tantangan : Kurangnya minat Pria untuk ber KB)*
10. Peningkatan Pelayanan KIE.
11. Peningkatan Penyelenggaraan KB Keliling.
12. Peningkatan Pelayanan konseling KB

13. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
  14. Pembentukan Kampung KB.
  15. Pengembangan Posdaya.
  16. Pemberian Penghargaan bagi kelompok kegiatan KB dan IMP terbaik, Akseptor lestari, Keluarga Harmonis, dan PLKB.  
*(tantangan : KIE Program Pembangunan Keluarga semakin berat).*
  17. Peningkatan Pembinaan dan pemberian bantuan kader Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL dan UPPKS.  
*(tantangan : Kader Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang sedikit sehingga satu Kader banyak yang merangkap beberapa Poktan).*
  18. Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD).
  19. Pengiriman jambore ke tingkat Provinsi untuk IMP, Tri bina, UPPKS dan Saka Kencana.  
*(tantangan : IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yang terdiri dari PPKBD, Sub PPKBD yang berpengetahuan rendah sering mengundurkan diri/keluar)*
- B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1. Peningkatan Advokasi Komisi Perlindungan Anak.
  2. Peningkatan Pengembangan Materi KIE tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keadilan dan kesetaraan gender.
  3. Peningkatan Koordinasi Anggota Focal Point.
  4. Peningkatan Penguatan Kelembagaan Forum Anak.
  5. Peningkatan Penguatan P2TP2A.
  6. Peningkatan Penyediaan Data dan Informasi tentang PUG, Anak dan Penanganan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
  7. Peningkatan Koordinasi Pokja PUG.
  8. Peningkatan PPRG.
  9. Peningkatan Advokasi Pengembangan KLA.
  10. Peningkatan Sistem Pencatatan KDRT.
  11. Peningkatan Kapasitas Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia.
  12. Peningkatan Advokasi Hari Tanpa Kekerasan.
  13. Peningkatan Pelatihan dan Ketrampilan Usaha Kecil Perempuan.
  14. Peningkatan Penguatan Kapasitas Perempuan.

(tantangan : Banyaknya orang tua yang memantau menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat).

(tantangan : Kemajuan teknologi membuat anak mudah mengakses gambar-gambar porno sehingga berpengaruh pada perilaku anak).

(tantangan : Kurangnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama, sikap perilaku dan budi pekerti kepada anak).

(tantangan : Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan).

(tantangan : Kurangnya SDM dalam menangani kasus dan pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di setiap Kecamatan).

Dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh BKBKSPP Kabupaten Wonogiri dibutuhkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun Dana dari Pusat yang berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Dekonsentrasi.

Selama 5 (lima) tahun terakhir Anggaran untuk pelaksanaan pelayanan BKBKSPP kabupaten Wonogiri sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.22  
Anggaran Pendanaan Pelayanan BKBKSPP  
Kabupaten Wonogiri

ANGGARAN	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	JUMLAH
APBD KAB.	2.315.312.000	2.928.927.500	5.009.730.500	4.943.964.500	5.780.371.665	20.978.306.165
APBD PROV	-	-	-	-	-	-
APBN PUSAT	1.951.435.000	1.012.728.000	2.476.871.000	3.692.101.000	2.664.839.000	11.797.974.000
JUMLAH	<b>4.266.747.000</b>	<b>3.941.655.500</b>	<b>7.486.601.500</b>	<b>8.636.065.500</b>	<b>8.445.210.665</b>	<b>32.776.280.165</b>

Dalam melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar selama 5 (lima) tahun oleh Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari alokasi dana APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2012-2016 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015  
(Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	143.400.000	1.620.290.000	326.423.000	605.464.000	840.870.000	131.243.477	1.620.290.000	302.716.347	568.064.457	747.531.451	91,52	100,00	92,74	93,82	88,90
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85.900.000	669.633.000	570.193.000	374.358.000	444.637.000	85.444.600	669.633.000	548.571.834	359.890.277	408.078.150	99,47	100,00	96,21	96,14	91,78
3	Program peningkatan disiplin aparatur	3.000.000	13.335.000	5.100.000	7.951.000	12.681.000	2.989.900	13.335.000	4.666.000	6.666.000	8.088.250	99,66	100,00	91,49	83,84	63,78
4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	-					-									
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5.000.000	95.353.500	74.366.000	50.000.000	17.500.000	5.000.000	95.353.500	66.414.400	47.077.000	16.471.000	100,00	100,00	89,31	94,15	94,12
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31.500.000	125.424.000	44.100.000	46.760.000	74.260.000	30.791.200	125.424.000	44.021.170	46.590.125	68.819.040	97,75	100,00	99,82	99,64	92,67
7	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	10.000.000	139.575.000	27.000.000	20.720.000	20.720.000	9.762.500	139.575.000	26.889.000	20.424.250	20.720.000	97,63	100,00	99,59	98,57	100,00
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	27.500.000	1.149.388.000	574.013.000	406.020.000	372.323.000	24.392.250	1.149.388.000	554.756.300	384.373.339	315.429.527	88,70	100,00	96,65	94,67	84,72
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	10.000.000	22.746.000	22.000.000	29.915.000	18.955.000	7.685.000	22.746.000	21.852.000	28.563.449	17.420.000	76,85	100,00	99,33	95,48	91,90
10	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	30.000.000	172.768.000	69.300.000	44.482.500	62.647.500	23.604.400	172.768.000	58.347.883	43.399.525	55.029.750	78,68	100,00	84,20	97,57	87,84
11	Program Keluarga Berencana	1.629.261.690	1.252.408.000	1.380.561.500	2.124.022.000	2.393.876.165	1.629.261.690	1.147.359.495	917.361.400	1.752.481.114	2.286.256.870	100,00	91,61	66,45	82,51	95,50

12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	10.000.000	92.000.000	70.000.000	72.520.000	89.105.000	10.000.000	91.385.000	64.637.755	65.558.000	83.124.000	100,00	99,33	92,34	90,40	93,29
13	Program Pelayanan Kontrasepsi	30.000.000	59.000.000	52.000.000	64.150.000	98.725.000	30.000.000	59.000.000	52.000.000	57.725.000	92.225.000	100,00	100,00	100,00	89,98	93,42
14	Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Program KB KR yang Mandiri	211.800.000	447.682.000	1.615.339.000	1.018.295.000	1.243.395.000	209.400.750	436.064.000	1.334.370.340	963.214.250	1.229.014.000	98,87	97,40	82,61	94,59	98,84
15	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	4.000.000	7.500.000	15.000.000	14.717.000	14.717.000	3.995.000	6.289.000	15.000.000	12.018.750	12.317.000	99,88	83,85	100,00	81,67	83,69
16	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	-	-	29.500.000	28.760.000	33.130.000	-	-	26.705.000	27.691.500	30.980.000			90,53	96,28	93,51
17	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	5.000.000	5.000.000	15.000.000	14.630.000	14.630.000	4.995.000	5.000.000	15.000.000	14.561.500	14.595.000	99,90	100,00	100,00	99,53	99,76
18	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	20.000.000	30.000.000	116.835.000	15.000.000	15.000.000	19.509.800	29.255.200	106.612.000	14.790.250	-	97,55	97,52	91,25	98,60	0,00
19	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-	35.000.000	3.000.000	6.200.000	13.200.000	-	33.399.400	2.945.000	4.300.000	11.650.000		95,43	98,17	69,35	88,26
20	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu	-	15.000.000	-	-	-	-	14.486.000	-	-	-		96,57			

Sedangkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri selama 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2016 s/d 2021) sebagaimana diuraikan dalam BAB V Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021.

### **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun sebelumnya Renstra BKBKSPP Kabupaten Wonogiri telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/ Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi

pembangunan lima tahun terakhir pada Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKBKSPP) Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan OPD belum optimal.
- d. Belum optimalnya data dan informasi OPD yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumen penting lainnya.
- f. Belum optimalnya pengelolaan web site dan twiter OPD.

2. Bidang Keluarga Berencana

- a. Masih tingginya Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) sebesar 9,67
- b. Masih tingginya angka Droup Out peserta KB sebesar 13,31
- c. Rendahnya kesertaaan ber KB Pria khususnya MOP.
- d. Masih banyaknya pernikahan usia anak.
- e. Rendahnya jumlah peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dibandingkan dengan jumlah peserta Non MKJP.
- f. Belum Optimalnya peran Kelompok KB Pria dalam keikutsertaan Advokasi dan KIE KB di lingkungan tempat tinggalnya.
- g. Belum Optimalnya peran Fapsedu dan Koalisi Kependudukan dalam pengendalian penduduk dan KB.

3. Bidang Keluarga Sejahtera.

- a. Pengelolaan data dan informasi kelompok kegiatan (Tri Bina dan UPPKS) belum menggambarkan kondisi riil di lapangan.

- b. Belum optimalnya pembinaan kelompok UPPKS sehingga belum secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I.
- c. Peran PPKBD dan Sub PPKBD belum optimal dalam penggerakan KB MKJP.
- d. Kurangnya peran TOGA dan TOMA dalam KIE KB.
- e. Belum berfungsinya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang telah terbentuk.
- f. Belum dimanfaatkannya hasil pendataan keluarga untuk capaian program.
- g. Masih tingginya rasio Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.
- h. Belum optimalnya peran keluarga dalam pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja.
- i. Belum dikelola dengan baik Kampung KB dan Posdaya yang telah terbentuk dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa/Kelurahan melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya guna mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas.

### 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan.

- a. Belum adanya data tentang anak.
- b. Belum optimalnya komitmen antar Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah yang ramah anak.
- c. Belum optimalnya peran forum anak untuk peningkatan kualitas hidup anak.
- d. Kurangnya pengetahuan keluarga dalam penanaman nilai-nilai agama, budi perkerti, sikap dan prilaku serta pergaulan yang sehat pada anak.
- e. Masih rendahnya empati masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak dilingkungannya.
- f. Masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak.
- g. Kurangnya pengetahuan perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan.
- h. Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga parlemen.
- i. Rendahnya partisipasi perempuan yang menduduki jabatan baik di Pemerintahan maupun di Swasta.
- j. Belum optimalnya P2TP2A yang telah terbentuk di setiap Kecamatan dalam pencegahan dan penganganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- k. Belum optimalnya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pencegahan dan penganganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016- 2021, permasalahan dan isu strategis untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

#### 1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumberdaya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun gap nya tidak terlalu besar. Perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas.

Permasalahan dan Isu Strategis sebagai berikut :

- 1) Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang, baik yang bekerja di lembaga pemerintahan, swasta maupun legislatif.
- 2) Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi.
- 3) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah, hal ini ditandai dengan masih adanya pekerja anak dibawah umur;
- 4) Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada;
- 5) Perlindungan anak terhadap pengaruh negatif media informasi global masih kurang.

#### 2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Perkembangan program Keluarga Berencana di Kabupaten Wonogiri cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/ Pasangan Usia Subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk.

Permasalahan dan Isu Strategis sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
- 2) Tingkat partisipasi KB secara keseluruhan masih rendah;
- 3) Partisipasi Pria dalam ber KB masih rendah;
- 4) Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang;
- 5) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
- 6) Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB cukup tinggi;
- 7) Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal, jumlah keluarga pra KS;
- 8) Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PKLK) belum optimal.
- 9) Pemahaman masyarakat dalam program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga masih rendah.

Untuk Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri**

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
	Indikator SPM :					
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;	32,20%	100%	Pelatihan bagi petugas P2TP2A	Petugas P2TP2A yang belum pernah mengikuti pelatihan karena kesibukan profesiya diluar P2TP2A	Kurangnya/belum adanya petugas terlatih.
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit;	56,00%	100%	Meningkatkan Intensitas Pertemuan/Koordinasi dengan OPD terkait dan melibatkan dalam pelatihan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk pelaksanaan pelatihan	Komitmen Pimpinan Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pengiriman petugas penanganan tindak kekerasan untuk mengikuti pelatihan	Belum maksimalnya kerjasama keterpaduan kerja dengan OPD terkait
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;	42,25%	75%	Meningkatkan Intensitas Pertemuan/Koordinasi dengan OPD terkait dan melibatkan dalam pelatihan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar OPD dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan rehabilitasi sosial penanganan tindak kekerasan	Kurangnya/kerjasama keterpaduan kerja Belum adanya petugas terlatih
4	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu ;	38,00%	75%	Pelatihan bagi petugas bimbingan rohani dalam P2TP2A	Komitmen pimpinan dalam pengiriman petugas bimbingan rohani penanganan tindak kekerasan untuk mengikuti pelatihan	Belum adanya kerjasama/keterpaduan kerja serta Belum adanya petugas terlatih

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (diluar keweangan PD)	
	Indikator SPM :					
5	Cakupan penegak hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;	18,00%	80%	Meningkatkan Komitmen Jajaran Penegak Hukum dan Pemangku kebijakan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perbedaan sudut pandang dalam penindakan kasus-kasus kekerasan	Belum adanya Kerjasama lintas sektoral
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum ;	80,00%	50%	Meningkatkan pendampingan hukum pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kesiapan petugas dalam pendampingan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan	
7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;	75,00%	50%	Meningkatkan pendampingan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Kerjasama antar OPD dalam pemulangan korban kekerasan	
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	75,00%	100%	Meningkatkan koordinasi antar OPD yang melayani masalah sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Komitmen penganggaran rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan	Belum terintegrasinya kebutuhan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada penganggaran OPD terkait

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
	Indikator SPM :					
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	0,43%	3,50%	Meningkatkan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Remaja dan Keluarganya.	Penyuluhan bagi Calon Pengantin tentang Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Kementerian Agama di tingkat Kecamatan	Belum maksimalnya petugas BP4 dalam ikut memberikan pengetahuan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
10	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif ;	79.74%	65.00%	Meningkatkan peran aktif seluruh petugas lini lapangan dan mitra kerja dalam pelaksanaan program KKB PK	Komitmen para pepangku Kebijakan dalam menempatkan program KKB PK sebagai prioritas pembangunan	Belum menempatkan program KKB PK pada prioritas pembangunan
11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need);	9.70%	5.00%	Meningkatkan penggerakan KB dengan memfokuskan pada PUS yang ingin ber KB	Meningkatkan koordinasi penggerakan KB pada moment-moment tertentu pada peringatan Hari-hari Nasional.	Belum adanya integrasi pada setiap kegiatan moment-moment tertentu Peringatan Hari-Hari Nasional tentang penggerakan program KKB PK
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB ;	82.78%	70.00%	Meningkatkan pertemuan kelompok BKB	Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan terpadu BKB Holistik terinterasi	Belum adanya komitmen dalam pelaksanaan kegiatan BKB Holistik terintegrasikan

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewangan PD)	Eksternal (diluar kewangan PD)	
	Indikator SPM :					
13	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87% ;	87.42%	87.00%	Meningkatkan kesertaan ber KB bagi anggota UPPKS Pra Sejahtera dan Sejahtera I	Bekerja sama dalam penanganan Kemiskinan	Belum adanya komitmen dalam penanganan Kemiskinan dan evaluasi semua PD yang terlibat
14	Ratio Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB 1 (satu) PKB/PLKB untuk setiap 2 (dua) desa/kelurahan;	1:5	1:2	Mengusulkan penambahan tenaga penyuluhan lapangan KB melalui pengadaan CPNS ke pusat maupun Kabupaten.	SKPD Kepegawaian Mengakomodir kebutuhan Tenaga Penyuluhan lapangan KB melalui Pengadaan CPNS	Penambahan tenaga penyuluhan lapangan KB (Pengadaan CPNS) yang sangat kecil tidak sebanding dengan kebutuhan
15	Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD .	1 Desa 1 PPKBD	1 Desa 1 PPKBD	Melakukan regenerasi bagi petugas PPKBD yang lanjut usia	Komitmen para Kepala Desa/Kelurahan dalam penunjukan petugas PPKBD	Pergantian PPKBD belum seluruhnya disampaikan

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewangan PD)	Eksternal (diluar keweangan PD)	
	Indikator RPJMD :					
16	Percentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0,46	0,69	Meningkatkan sosialisasi peningkatan kualitas perempuan di segala bidang	Persepsi terhadap kompetensi jabatan	Penempatan jabatan belum responsif gender
17	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0,44	0,44	Meningkatkan sosialisasi peran perempuan dalam pembangunan	Kebijakan dalam bidang invenstasi daerah	Masih didominasi sebagai buruh baik pada pabrik maupun toko
18	Rasio KDRT	0,00008	0,003	Pembentukan P2TP2A di semua Kecamatan	Keterlibatan OPD lain dalam Sosialisasi KDRT	Kurangnya SDM dalam penanganan kasus KDRT
19	Percentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,056	0,048	Meningkatkan sosialisasi tentang perlindungan anak	Kondisi ekonomi masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat terutama keluarga dalam perlindungan anak
20	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,89	1,00	Meningkatkan Advokasi dan KIE KB	Komitmen Pemangku Kebijakan penempatan program KKB PK dalam prioritas pembangunan	Kurangnya koordinasi untuk meningkatkan peran Toga dan Toma dalam KIE KKB PK di lini lapangan
21	Rasio akseptor KB	79,94	82,47	Meningkatkan peran PPKBD dan Sub PPKBD dalam pelaksanaan program KKB PK di lini lapangan	Regulasi dalam pelayanan KB di Puskesmas	Kurangnya tenaga penyuluh KB (PLKB/PKB) karena pensiun
22	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	33,56	37,54	Meningkatkan ekonomi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	Keyakinan masyarakat banyak anak banyak rejeki	Kurangnya anggota UPPKS Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang ber KB

### **3.2. TELAAH VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.**

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wonogiri tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri terpilih tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tersebut yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

#### **1. Visi**

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016- 2021 hasil pilkada 9 Desember 2015 adalah:

**Visi :**

**“MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS”.**

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri tersebut di atas, maka Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan termasuk juga anak.

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun kedepan peran Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kondisi 5 tahun kedepan	Peran Dinas PPKB dan P3A
1	2	3
1	<p><b>SUKSES</b> : Wonogiri sukses adalah kemampuan daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan MANAJEMEN SUKSES (Stabilitas, Undang-Undang, Koordinasi, Sasaran, Evaluasi dan Semangat Juang) menjadi pegangan dalam menjalankan roda pemerintahan agar berhasil dan sejajar dengan daerah lainnya.</p> <p>Pemerintahan dengan manajemen sukses indikatornya adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya.</p>	
2	<p><b>BERIMAN</b> : Wonogiri yang beriman adalah mewujudkan masyarakat yang hidup berkeTuhanan dimana keadaan jiwa dan raganya merasakan kedamaian dan ketenraman menjalankan kegiatan keagamaan masing-masing. Masyarakat yang beriman indikatornya adalah meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.</p>	
3	<p><b>BERBUDAYA</b> : Wonogiri berbudaya adalah mewujudkan masyarakat wonogiri yang memiliki perilaku dan tingkah laku yang berakal budi dengan mengembangkan budaya dan adat istiadat yang dari generasi ke generasi. Manusia berbudaya diartikan sebagai manusia yang dalam kehidupannya berperlakuan baik, bermoral, sopan dan santun terhadap sesama manusia atau mahluk ciptaan Tuhan.</p> <p>Keberhasilan wonogiri yang berbudaya adalah terbinanya dan terlestariannya adat istiadat, budaya dan tradisi yang ada di masyarakat.</p>	<p>Melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan didukung bidang lainnya melalui kegiatan-kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah lain yang terkait untuk meningkatkan kualitas hidup anak menuju generasi yang bermoral, berbudi perkerti mulia, sopan, santun serta menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, adat istiadat masyarakat Wonogiri.</p>
4	<p><b>MEMBANGUN WONOGIRI YANG BERKEADILAN</b> yaitu : Pembangunan berkeadilan dirancang secara adil dan merata dengan melibatkan seluruh masyarakat secara aktif, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat wonogiri.</p> <p>Pembangunan berkeadilan ditandai dengan pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak.</p>	<p>Melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan didukung bidang lainnya diharapakan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “Wonogiri yang berkeadilan” melalui, kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak.</p>

No	Kondisi 5 tahun kedepan	Peran Dinas PPKB dan P3A
1	2	3
5	MEMBANGUN WONOGIRI YANG BERDAYA SAING yaitu : Wonogiri yang berdayasaing merupakan kondisi unggul yang memungkinkan terjadinya peningkatan keberdayaan pemerintahan dan masyarakat Wonogiri, melalui pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien sehingga memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan guna melangsungkan kehidupan dalam persaingan masyarakat global untuk memiliki daya akselerasi dalam mewujudkan peningkatan pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan menuju kesejahteraan masyarakat. Berdaya saing ditandai dengan meningkatnya kinerja ekonomi daerah melalui sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan sistem ekonomi kerakyataan daerah bertumpu pada potensi unggulan.	Melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Keluarga Sejahtera dan juga didukung bidang lainnya dalam pengendalian penduduk dengan mengaturan kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan kematian ibu melahirkan, menekan angka pernikahan dini, meningkatkan ekonomi keluarga terutama keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I menuju masyarakat wonogiri berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

## 2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan melalui tujuh misi sebagai berikut :

1. Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta

- Wonogiri Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat;
3. Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa;
  4. Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama Daerah-Daerah Lain;
  5. Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri;
  6. Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang;
  7. Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Kemaslahatan Rakyat Wonogiri.

Dari ketujuh Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri tersebut di atas, maka misi ke dua, misi ke enam dan misi ketujuh adalah misi yang wajib/harus di emban Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Misi ke dua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri dengan pengendalian penduduk, meningkatkan kualitas hidup anak dan kesetaraan gender, disamping itu juga mendukung misi ke tiga, dan misi keempat.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ikut mengemban misi kedua bersama Perangkat Daerah yang lain, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berperan dalam pengendalian penduduk, mengaturan kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan kematian ibu melahirkan, menekan angka pernikahan dini, meningkatkan ekonomi keluarga terutama keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I menuju masyarakat wonogiri berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, dengan melaksanakan :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;

3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PD PROVINSI JAWA TENGAH**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 kementerian yaitu : Kementerian Kesehatan yang didalamnya adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2015-2019, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dikaitkan dengan telaah Renstra Kementerian dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 memiliki kaitan yang erat dengan Renstra BKBKSPP Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021 Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua kementerian tersebut dan Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

#### **3.3.1. Telaah Renstra pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah.**

Pada Agenda Prioritas Pembangunan 2015-2019 No. 5 (lima) yaitu untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.”

Untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia Visi BKKBN adalah dengan menjadi **“Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”**, sejalan dengan Visi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 yaitu **“Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Keluarga**

**Kecil menuju masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari” dan Visi BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 “Menjadi Lembaga yang handal dalam percepatan pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta Keluarga Kecil Sejahtera”.**

Dari visi-visi diatas sama-sama menjadikan lembaga yang handal dan dipercaya untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Sejahtera, berdikari dan berkualitas guna mendukung agenda prioritas pembangunan 2015-2019 (NAWA CITA) yang ke lima yaitu “ Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu **“Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Demokratis”**. Kesesuaian pada visi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonogiri (sesuai Tugas Pokok dan Fungasi BKBKSPP Kabupaten Wonogiri) dengan BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah adalah pada mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi melalui peningkatan kualitas hidup keluarga untuk mendukung NAWA CITA nomor lima yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.

Pada Misi ada kesesuaian antara Renstra BKKBN, Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah yaitu Melembagakan Keluarga Kecil Sejahtera dan Mempercepat pencapaian ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Sedangkan pada Sasaran ada kesesuaikan dalam hal : meningkatkan kesetaraan ber KB; meningkatkan usia perkawinan; menurunkan CPR, Drop Out, Unmet need.

Telaah terhadap Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019, Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 dan Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang mempengaruhi pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dilihat dari faktor mendorong dan faktor penghambat sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat :

- a. OPD Provinsi belum menjalankan seluruh amanat Renstra BKKBN, tetapi hanya menjalankan sebagian yang menjadi tupoksinya.

- b. Program dan Kebijakan di dalam Renstra BKKBN belum seluruhnya dilaksanakan oleh BP3AKB, sesuai dengan Program dan Kegiatan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi acuan kegiatan OPD KB di daerah, sementara RPJMD Provinsi belum seluruhnya mengakomodasi program-program yang diselaraskan dengan program Nasional.
- c. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM OPD KB di Provinsi dalam pelaksanaan agenda program KB dan KS.

2. Faktor Pendorong :

- a. Adanya kebijakan tentang Pembangunan Kependudukan di daerah.
- b. Adanya Perwakilan BKKBN di Provinsi sehingga dapat mendorong ketercapaian target-target yang telah ditetapkan secara Nasional.
- c. Terakomodirnya Program dan Kegiatan dalam RPJMD Kabupaten sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Adanya Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik untuk menunjang pencapaian target Nasional.
- e. Adanya koordinasi dan komitmen yang kuat mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten terkait dengan Kelembagaan.

### **3.3.2. Telaah Renstra pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah.**

Dilihat dari Visi, Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah memiliki kesamaan yaitu menggunakan frase “Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak”. Demikian juga pada misinya, dimana pada misi keduanya terdapat unsur-unsur “Kualitas Hidup Perempuan dan Anak”, sementara itu dari tujuan sama-sama ingin mewujudkan program Gender dan Anak untuk meningkatkan IPG dan IDG, serta memberikan perlindungan perempuan dan anak. Pada Sasaran strategisnya sama-sama ingin mewujudkan Pemerintah Daerah yang responsif gender dan anak untuk meningkatkan IPG dan IDG, serta memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Sedangkan untuk arah kebijakan adalah memperkuat kelembagaan PUG untuk mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan

responsif gender di seluruh bidang pembangunan; memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.

Kesesuaian dengan visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri) adalah mewujudkan generasi yang bermoral, berbudi perkerti mulia, sopan, santun serta menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, adat istiadat masyarakat Wonogiri, pembangunan berkeadilan ditandai dengan pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak, dengan Sasaran Strategisnya meningkatkan IPG dan Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu :

1. Faktor Penghambat :

- a. Adanya perbedaan antara urusan PP dan PA antar daerah dan pusat, sehingga seringkali urusan daerah tidak tertampung pada urusan dan dokumen perencanaan Kementerian PP dan PA.
- b. Belum tersedianya panduan pelaksanaan PPRG dan PUHA yang jelas dengan menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang berbeda dengan pusat.
- c. Terbatasnya kapasitas SDM daerah dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, sementara TOT untuk fasilitator masih sangat kurang disebabkan terbatasnya tenaga fasilitator baik di OPD Provinsi maupun di Kabupaten.
- d. Belum adanya modul dan standar yang jelas untuk pelatihan tenaga bagi tenaga pelayanan terpadu (tenaga pengaduan, tenaga medis, tenaga rehab sosial dll).
- e. Perbedaan waktu penyusunan dokumen perencanaan baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten sering kali terdapat program dan kegiatan di Kementerian PP dan PA RI yang tidak dapat ditampung dalam dokumen perencanaan daerah.

2. Faktor Pendorong :

- a. Komitmen yang kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan PPRG, dan semangat Tim driver untuk mengembangkan PPRG sampai ke tingkat Kecamatan.
- b. Adanya kebijakan daerah yang diterbitkan untuk mendorong implementasi kebijakan pusat, baik PUG, pemberdayaan Perempuan maupun Tumbuh Kembang dan perlindungan anak.
- c. Adanya Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan yang mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen di daerah harus memperhitikan dokumen perencanaan di pusat dan dorongan dari Kementerian PP dan PA RI kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kebijakan Pusat.
- d. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam upaya melaksanakan sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah.
- e. Adanya Kebijakan yang wajib dilaksanakan sampai ke daerah dalam upaya melembagakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mewujudkan wilayah ramah anak.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Berdasarkan muatan yang ada dalam dokumen RTRW sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Wonogiri tahun 2010 – 2030 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, Pusat kegiatan perkotaan terdiri atas:

- a. PKL berupa Perkotaan Wonogiri.
- b. PKLp meliputi: Perkotaan Purwantoro, Perkotaan Pracimantoro dan Perkotaan Baturetno.
- c. PPK meliputi: Perkotaan Eromoko, Manyaran, Ngadirojo, Tirtomoyo, Kismantoro, Paranggupito, Giritontro, Batuwarno, Karangtengah, Nguntoronadi, Jatiroto,

Bulukerto, Puhpelem, Giriwoyo, Jatipurno, Girimarto, Slogohimo, Jatisrono, Selogiri, Wuryantoro dan Sidoharjo.

Sedangkan pusat kegiatan perdesaan meliputi seluruh kecamatan di kabupaten Wonogiri. Kawasan lindung terdiri atas: kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Kawasan budidaya terdiri atas: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Penetapan Kawasan Strategis pada RTRW Kabupaten Wonogiri terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan strategis provinsi terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukawonosraten), kawasan koridor perbatasan Pacitan – Wonogiri – Wonosari (Pawonsari), kawasan koridor jalur lintas selatan dan pesisir Jawa Tengah, dan kawasan agropolitan Jawa Tengah.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa berupa Kawasan Karst Pracimantoro meliputi: Kecamatan Eromoko, Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Giritontro, Kecamatan Paranggupito, dan Kecamatan Giriwoyo

**Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:**

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: kawasan perkotaan Wonogiri, kawasan perkotaan Pracimantoro, kawasan perkotaan Purwantoro, kawasan perkotaan Baturetno, kawasan sekitar terminal penumpang tipe A, dan kawasan koridor pantai selatan;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa situs cagar budaya meliputi: Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Selogiri, Kecamatan Tirtomoyo, dan Kecamatan Girimarto;

- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Waduk Serba Guna Wonogiri;
- d. kawasan strategis dari sudut penyelamatan lingkungan hidup meliputi: Sub DAS Keduang, Sub DAS Wuryantoro, Sub DAS Wiroko, Sub DAS Temon, Sub DAS Alang Ngunggahan, Sub DAS Solo Hulu.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dalam KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 Program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja, Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan Program Wonogiri Sehat dan Wonogiri Beriman sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, mengedepankan sikap toleransi antar umat.

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada antara lain:

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Misi 6 : Pemerataan Pemangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang.

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada antara lain :

- Program Perluasan Kerja Masyarakat miskin.

Misi 7 : Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Keselamatan Rakyat Wonogiri.

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada antara lain :

- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

### 3.5.1. Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Isu Strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :

Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak serta kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

### 3.5.2. Isu Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Isu Strategis pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);

2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga dengan ditandai cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani serta belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. VISI DAN MISI PD**

##### **4.1.1. Visi**

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidaklindungi, rasa terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan dikucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap bentuk sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat serta budaya masyarakat.

Dengan jumlah penduduk yang masih sangat besar dan jumlah lahan tidak bertambah luas maka peningkatan kualitas penduduk menjadi salah satu target utama dari pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri adalah pengendalian penduduk melalui pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta mengatasi permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, keadilan dan kesetaraan gender untuk menuju masyarakat wonogiri yang berkualitas.

Pembangunan selama ini telah diposisikan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (*human capital*) dan obyek (*human resources*) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (*life cycle approach*).

Fokus pembangunan Sumber Daya Manusia untuk menuju masyarakat Wonogiri yang berkualitas, maka sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yaitu meningkatkan kualitas keluarga dan penanggulangan kemiskinan terutama penekanan pertambahan jumlah kelahiran, termasuk juga penyediaan pelayanan KB, peningkatan ketahanan keluarga,

perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta pemberdayaan perempuan terutama pada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah dalam rangka mencapai visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), yaitu:

**“MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS”**

Untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia Visi BKKBN adalah dengan menjadi **“Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”**, dan Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak”**.

Hal ini sejalan dengan Visi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 yaitu **“Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Keluarga Kecil menuju masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari”** dan Visi BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 **“Menjadi Lembaga yang handal dalam percepatan pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta Keluarga Kecil Sejahtera”**.

Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021) sebagaimana tersebut diatas.

Untuk mendukung Visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri tersebut, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan jumlah penduduk yang masih sangat besar dan jumlah lahan tidak bertambah luas disamping juga masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini, maka Visi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUK MENUJU KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”**

Makna dari terwujutnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, merupakan perwujudan dari suatu keluarga kecil terdiri dari Ibu, Bapak dan 2 (dua) Anak Cukup, yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Sedangkan makna dari terwujudnya Kesetaraan Gender adalah terwujudnya Kesetaraan Gender dimana kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Terwujudnya Perlindungan Anak, yaitu suatu kondisi yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **4.1.2. Misi**

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang ada, maka untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2016-2021, ditetapkan Misi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, yaitu:

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;

3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja PD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENERANGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran per tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16
1. Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);	Pengendalian penduduk	1. Meningkatnya pengendalian laju penduduk	1. Laju pertumbuhan penduduk	%	0,31	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga dengan ditandai cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani serta belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi;	Peningkatan Kualitas Keluarga	2. Meningkatnya peserta KB aktif	2.Cakupan KB aktif	%	79,38	79,50	79,55	79,60	79,60	79,65	79,70
			3. Unmetneed	%	9,83	9,50	9,50	9	9	8,50	8,50
3. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak serta kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.	Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak	3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan	4. Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan	%	8,89	-4,86	6,99	12,50	28,57	40,00	66,67
			5. Rasio partisipasi perempuan	Angka	0,044	0,045	0,050	0,055	0,056	0,057	0,060

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran per tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	5	11	1	2	3	4	5
		4. Meningkatnya kualitas hidup anak	6. Persentase Penurunan Kekerasan terhadap Anak	%	-19,35	2,70	16,67	26,67	45,45	58,33	60,00
			7. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Skor/Tingkat	510/Pratama	510/Pratama	610/Pratama	670/Pratama	710/Pratama	750/Madya	750/Madya

#### **4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017-2021.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Rumusan Pernyataan Strategi dan Kebijakan PD dalam Lima Tahun Mendatang**

<p>Visi : "Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia, Sejahtera, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak".</p> <p>Misi :</p> <p>1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.1. Pengendalian penduduk	1.1.1. Meningkatnya pengendalian laju penduduk	1.1.1.1. Peningkatan pelayanan program KKB PK lini lapangan	1.1.1.1.1. Memperkuat Koordinasi dan Komitmen dengan Mitra Kerja
<p>Misi :</p> <p>2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2.1. Peningkatan Kualitas Keluarga	2.1.1. Meningkatnya peserta KB aktif	2.1.1.1. Peningkatan Kualitas SDM tenaga penyuluhan lapangan KB termasuk PPKBD dan Sub PPKBD	2.1.1.1.1. Meningkatkan Anggota Kelompok Kegiatan yang ber KB MKJP
<p>Misi :</p> <p>3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3.1. Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak	3.1.1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan	3.1.1.1.. Peningkatan Kualitas Sumber daya Perempuan	3.1.1.1.1.. Memberikan Pembinaan, pelatihan dan ketrampilan perempuan
	3.1.2. Meningkatnya kualitas hidup anak	3.1.1.2. Peningkatan kualitas hidup anak melalui partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak	3.1.1.1.2. Mempercepat perwujudan kabupaten layak anak.



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program Perangkat Daerah (PD) merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Wonogiri di atas, maka dalam tahun 2017-2021 Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan 4 (empat) Program pada urusan wajib non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 9 (sembilan) Program pada urusan wajib non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1 . Selanjutnya untuk Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci sebagaimana pada lampiran Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **6.1. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Prestasi PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas PPKB

dan P3A Kabupaten Wonogiri kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri tahun 2016 - 2021.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2017 – 2021 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Sasaran/Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran per tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Penjelasan Target Kinerja
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
1. Laju Pertumbuhan Penduduk	0,31%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,28%	0,27%	0,27%	Jmlh Penddk saat ini – Jmlh Penddk sebelumnya x100% Jumlah Penduduk saat ini
2. Cakupan KB aktif	79,38 %	79,50%	79,55%	79,60%	79,60%	79,65%	79,70%	79,70%	Jmlh Peserta KB Aktif x100% Jumlah Pasangan Usia Subur
3. Unmetneed	9,83%	9,50%	9,50%	9%	9%	8,50%	8,50%	8,50%	Jmlh PUS IAT + TIAL x100% Jumlah Pasangan Usia Subur
4. DO KB	22,42%	14%	-	-	-	-	-	-	Jmlh PA Des th sebelumnya+PB s/d sekarang=PA seharusnya-PA sekarang = DO Fisik x100% Jumlah PA Des th sebelumnya

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
5. Rasio KDRT	0,0018	0,0018	-	-	-	-	-	-	Jmlh KDRT x 100% Jumlah Kepala Keluarga (Rumah Tangga)
<b>5. Diganti menjadi 4. "Prosentase penurunan kekerasan terhadap perempuan "</b>	8,89%	<b>-4,89%</b>	<b>6,99%</b>	<b>12,50%</b>	<b>28,57%</b>	<b>40,00%</b>	<b>66,67%</b>	<b>66,67%</b>	Jmlh Kekerasan terhadap Perempuan Th. lalu -Th sekarang ((n-1)-(n)) x 100% Jumlah Kekerasan terhadap perempuan tahun lalu (n-1)
5. Rasio partisipasi perempuan	0,044	0,045	0,050	0,055	0,056	0,057	0,060	0,060	Jmlh Perempuan di Parlemen + di Pemerintsh + di Swasta Jumlah Penduduk Perempuan
7. Rasio Kekerasan Anak yang tidak tertangani	10,53%	10,00%	-	-	-	-	-	-	Jmlh Anak Korban Kekerasan yg tdk tertangani x 100% Jumlah Kekerasan Anak
8. Rasio partisipasi anak	0,71%	0,74%	-	-	-	-	-	-	Jmlh Anak yg ikut musrebang+ Jmlh Anak yg mjd konselor sebaya + Jmlh Anak yg aktif di PIK KRR + Jmlh Anak yg aktif di Forum Anak x 100% Jumlah Anak
<b>6. Indikator No 7 dan No 8 Diganti menjadi "Prosentase penurunan kekerasan terhadap anak "</b>	-19,35%	<b>2,70%</b>	<b>16,67%</b>	<b>26,67%</b>	<b>45,45%</b>	<b>58,33%</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	Jmlh Kekerasan terhadap Anak Th. lalu - Th sekarang ((n-1)-(n)) x 100% Jumlah Kekerasan terhadap Anak tahun lalu (n-1)
7. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	510/Pratama	510/Pratama	610/Pratama	670/Pratama	710/Pratama	750/Madya	750/Madya	750/Madya	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dengan adanya telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri pada awal tahun 2017, maka perlu segera disusun Rencana Strategis untuk Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi Pembangunan Daerah guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Wonogiri terpilih Tahun 2016-2021 yang lebih terukur, akuntabel dan sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Dalam Dokumen Renstra ini untuk kinerja dan keuangan Daerah Tahun 2012-2016 adalah merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan BKBKSPP, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja Dinas PPKB dan P3A tahun 2016-2021.

Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja dan pedoman pelayanan Dinas PPKB dan P3A untuk menyusun Program dan Kegiatan tahun 2016 – 2021 serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi tahun 2021.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, maka penyusunan Renstra Dinas PPKB dan P3A mengacu pada capaian kinerja dan pelayanan pada BKBKSPP Kabupaten Wonogiri 2011-2015 karena Dinas PPKB dan P3A melanjutkan pelaksanaan Program Nasional Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta Program Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dilaksanakan oleh BKBKSPP Kabupaten Wonogiri sebelumnya.

Dinas PPKB dan P3A berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra dimaksud ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PPKB dan P3A Tahun 2016-2021 dan masa transisi Tahun 2021.

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2016-2021.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mampu mencapai visi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wongiri : “TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUK MENUJU KELUARGA KECIL BAHAGIA, SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK” guna mewujudkan masyarakat Wonogiri yang berkualitas yang dimulai dari Keluarga yang Berkualitas.

Pelaksanaan Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri 2016-2021 ini secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan maupun pemangku kebijakan, perlu dilibatkan dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonogiri yang beriman, berbudaya dan memiliki daya saing yang tinggi guna menyongsong peradaban baru. sebagaimana visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri : “MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS” yang tertuang dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Demikian penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, agar dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap perencanaan tahunan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Wonogiri kedepannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi pentunjuk dan bimbingan kepada kita semua, aamiin.

Wonogiri, 17 Juli 2017

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA dan  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI

RENI RATNASARI, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631220 199010 2 002